



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BLU LPMUKP

SETJEN KKP



Badan Layanan Umum
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

www.blulpmukp.id



@blulpmukp



@blulpmukp



BLU LPMUKP

KATA PENGANTAR

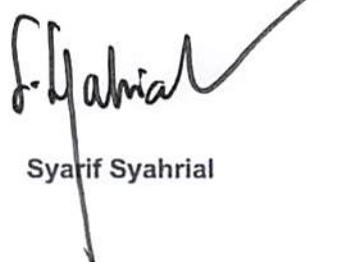
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan Satuan Kerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I. yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016, ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. LPMUKP bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengelolaan dana bergulir pada tahun 2021, LPMUKP sesuai dengan tugasnya akan memberikan layanan pinjaman atau pembiayaan modal usaha yang berpendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, LPMUKP juga tidak terlepas dari tugasnya sebagai Satuan Kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dibuatlah Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai laporan yang memuat tentang capaian kinerja BLU LPMUKP selama Tahun Anggaran 2021 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 25 Januari 2021

Direktur LPMUKP



Syarif Syahrial

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sumber Daya Manusia LPMUKP	4
1.5. Visi dan Misi LPMUKP	11
1.6. Tugas dan Fungsi LPMUKP	12
1.7. Budaya Organisasi	12
1.8. Sistematika Penulisan Laporan	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Kerja LPMUKP	15
2.2. Perjanjian Kinerja	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja LPMUKP	24
3.2. Kinerja Keuangan	46
3.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU LPMUKP Tahun 2020	50
BAB IV. PENUTUP	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP	10
2. Tabel 1.2 Jumlah Pegawai LPMUKP Tahun 2021	10
3. Tabel 1.3 Klasifikasi SDM LPMUKP	11
4. Tabel 2.1 Tarif Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP	16
5. Tabel 2.2 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP	19
6. Tabel 2.3 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP pasca APBNP	20
7. Tabel 2.4 Jumlah Potensi Target Pemanfaat Dana Bergulir LPMUKP	21
8. Tabel 2.5 Proyeksi Pendapatan LPMUKP Tahun 2021	21
9. Tabel 2.6 Target Kontrak Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2021	22
10. Tabel 3.1 Capaian IKU BLU LPMUKP Tahun 2021	25
11. Tabel 3.2 Rincian PNBPN BLU per Bulan	27
12. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian PNBPN	28
13. Tabel 3.4 Jumlah Potensi Target Pemanfaat Dana Bergulir LPMUKP	28
14. Tabel 3.5 Perbandingan Capaian PNBPN	29
15. Tabel 3.6 Target Penyaluran Dana Bergulir	30
16. Tabel 3.7 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Per Sektor Usaha	31
17. Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IKU Realisasi Penyaluran Dana Bergulir	32
18. Tabel 3.9 Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih	34
19. Tabel 3.10 Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih	34
20. Tabel 3.11 Realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih	34
21. Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih	35
22. Tabel 3.13 Realisasi Anggaran LPMUKP per 31 Desember 2021	36
23. Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih	37
24. Tabel 3.15 Target Modernisasi Pengelolaan BLU	38
25. Tabel 3.16 Realisasi target Modernisasi Pengelolaan BLU	38
26. Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Modernisasi BLU	41
27. Tabel 3.18 Skor Aspek Penilaian Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP	41
28. Tabel 3.19 Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP	42
29. Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP	44
30. Tabel 3.21 Target Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup LPMUKP	45
31. Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja MP	45

32. Tabel 3.23 Target Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2020	
Lingkup BLU LPMUKP	46
33. Tabel 3.24 Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup	
Sekretariat Jenderal.....	47
34. Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK	
Lingkup LPMUKP	47
35. Tabel 3.26 Target Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	
Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP	48
36. Tabel 3.27 Rekap Realisasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan.....	48
37. Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	49
38. Tabel 3.29 Posisi Keuangan/Neraca LPMUKP per 31 Desember 2021	
dan 31 Desember 2020.....	52
39. Tabel 3.30 Daftar Peraturan Direktur LPMUKP Tahun 2021.....	53
40. Tabel 3.31 Pemberitaan BLU LPMUKP melalui Media <i>Online</i>	57
41. Tabel 3.32 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP	
per 31 Desember 2021	61

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMUKP.....	4
2. Gambar 1.2 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP	9
3. Gambar 1.3 Komposisi Pegawai LPMUKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	11
4. Gambar 3.1 Grafik Realisasi Anggaran Per Output	36
5. Gambar 3.2 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Berdasarkan SMART DJA.....	41
6. Gambar 3.3 Tampilan Posting pada Aplikasi Bitrix LPMUKP	46
7. Gambar 3.4 Perkembangan Pendapatan PNBPN BLU	50
8. Gambar 3.5 Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBN LPMUKP Tahun 2021	51
9. Gambar 3.6 BLU LPMUKP dalam Media Sosial	54
10. Gambar 3.7 Tampilan <i>Website</i> LPMUKP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa (termasuk dana bergulir) yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian pengaturan terkait Badan Layanan Umum (BLU) tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lemabga, dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (Satker BLU). Atas dasar hal tersebut, dibentuklah satuan kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai BLU dengan rumpun pengelolaan dana bergulir di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LPMUKP ditetapkan menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum dengan status penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kemudian pada Tahun 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan terkait struktur organisasi dan tata kelola BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Tugas dan fungsi utama BLU LPMUKP sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 3 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang kemudian dilakukan melalui tiga skema penyaluran dana bergulir yaitu model penyaluran langsung kepada UMKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 4/PER-LPMUKP/2017, kemudian model penyaluran melalui LKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 3/PER-LPMUKP/2017 serta model penyaluran melalui LKB/LKBB lainnya.

BLU LPMUKP diberikan dana kelolaan pada Tahun 2017 sebesar Rp.500.000.000.000,00 yang kemudian dana kelolaan tersebut diberikan tambahan sebesar Rp.850.000.000.000,00 pada Tahun 2018, sehingga total dana kelolaan yang dimiliki oleh BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.1.350.000.000.000,00. Sejak tahun pertamanya hingga akhir Desember 2021, dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir, LPMUKP telah menyalurkan pinjaman kepada masyarakat kelautan dan perikanan sebesar Rp.872.616.798.490,00 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 24.217 jiwa. Dengan adanya program penyaluran dana bergulir yang dikhususkan untuk masyarakat kelautan dan perikanan, diharapkan mampu untuk mendongkrak ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan membiayai pelaku usaha yang bersifat nonbankable yang diberikan pendampingan selama menjadi debitur LPMUKP hingga pelaku usaha atau kelompok usaha tersebut menjadi bankable.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2021 memiliki maksud sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pelaporan kinerja dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai suatu wadah atau sarana untuk mengkomunikasikan/mempublikasikan capaian kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

1.3. Tugas dan Fungsi LPMUKP

Sesuai pengaturan dalam pengelolaan keuangan negara, LPMUKP perlu ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Untuk mendukung hal tersebut, pada tanggal 20 September 2016 LPMUKP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016. Melalui penetapan PPK BLU, diharapkan LPMUKP mampu menjalankan peran pemerintah sebagai salah satu solusi atas permasalahan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Adanya alokasi dana kelolaan sektor kelautan dan perikanan yang dikelola oleh LPMUKP tentu menuntut hadirnya tata kelola organisasi yang baik serta perencanaan bisnis dan penganggaran yang matang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi seperti risiko operasional, hukum, kredit macet dan bermasalah serta risiko lainnya, di samping untuk memberikan pelayanan pinjaman atau pembiayaan yang optimal pada masyarakat kelautan dan perikanan. Seiring dengan perkembangan LPMUKP yang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU, Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017, LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

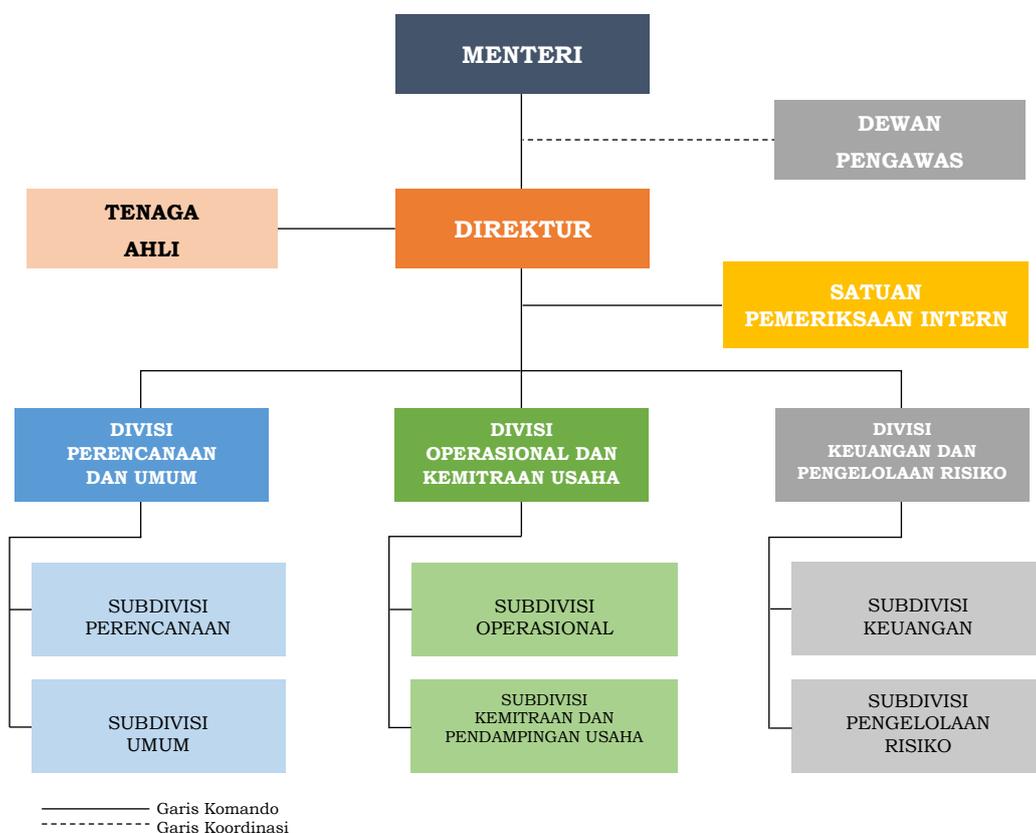
Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMUKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

1.4. Sumber Daya Manusia LPMUKP

1.4.1. Organisasi BLU LPMUKP

Penetapan BLU LPMUKP sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Adapun struktur organisasi BLU LPMUKP dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMUKP

A. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLU LPMUKP mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan BLU LPMUKP mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait operasional Satker LPMUKP.

Dewan Pengawas BLU LPMUKP memiliki tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU LPMUKP mengenai pengelolaan LPMUKP baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Kewajiban Dewan Pengawas BLU LPMUKP adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan dan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU LPMUKP.
- b. Melaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja LPMUKP dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas BLU LPMUKP berwenang untuk:

- a. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU LPMUKP antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja.
- b. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU LPMUKP.
- c. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern.
- d. Meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Mengingat belum adanya Dewan Pengawas BLU LPMUKP yang definitif, maka Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengganti Dewan Pengawas BLU LPMUKP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

B. Direktur BLU LPMUKP

Direktur BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan BLU LPMUKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan BLU LPMUKP;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan Pelaporan keuangan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pengoordinasian pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

C. Tenaga Ahli BLU LPMUKP

Tenaga Ahli BLU LPMUKP dalam pelaksanaannya mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Direktur BLU LPMUKP, baik diminta maupun tidak diminta.

D. Satuan Pemeriksa Intern

Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP dalam pelaksanaannya mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas BLU LPMUKP.

E. Divisi Perencanaan dan Umum

Divisi Perencanaan dan Umum BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, rencana kerja dan anggaran, urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

Divisi Perencanaan dan Umum dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kajian pengelolaan dana; dan
- c. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

Divisi Perencanaan dan Umum dalam penyelenggaraannya terdiri dari 2 (dua) sub divisi, yaitu:

- a. Sub divisi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bisnis, RBA tahunan, rencana kerja dan anggaran, serta pelaksanaan kajian pengelolaan dana.
- b. Sub divisi Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

F. Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha

Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan, pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kerja sama dengan *stakeholders*, pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan;
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan *stakeholders*;
- d. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha terdiri dari 2 (dua) sub divisi, yaitu:

- a. Sub divisi Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana operasional penyaluran dana kelolaan, standar operasional prosedur, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan dana kelolaan, pengelolaan dokumen administrasi penyaluran dana kelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Sub divisi Kemitraan dan Pendampingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan *stakeholders*, pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pendampingan usaha serta pelatihan.

G. Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko BLU LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan anggaran dan keuangan, pelaksanaan transaksi, penyusunan sistem akuntansi, laporan keuangan, pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerja sama pendanaan, penilaian kelayakan proposal pinjaman, dan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan;
- b. Pelaksanaan transaksi penyaluran dana;
- c. Pelaksanaan penyusunan sistem akuntansi dan laporan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengembangan dana kelolaan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan penilaian kelayakan proposal pinjaman; dan
- f. Pelaksanaan pengelolaan risiko, investasi, dan aset.

Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko terdiri dari 2 (dua) sub divisi, yaitu:

- a. Sub divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan anggaran dan keuangan, transaksi penyaluran dana, penyusunan sistem akuntansi, laporan keuangan, serta pengembangan dana kelolaan dan pendapatan.
- b. Sub divisi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kelayakan proposal pinjaman, pengelolaan risiko, investasi, dan aset.

1.4.2. Pejabat Pengelola BLU LPMUKP

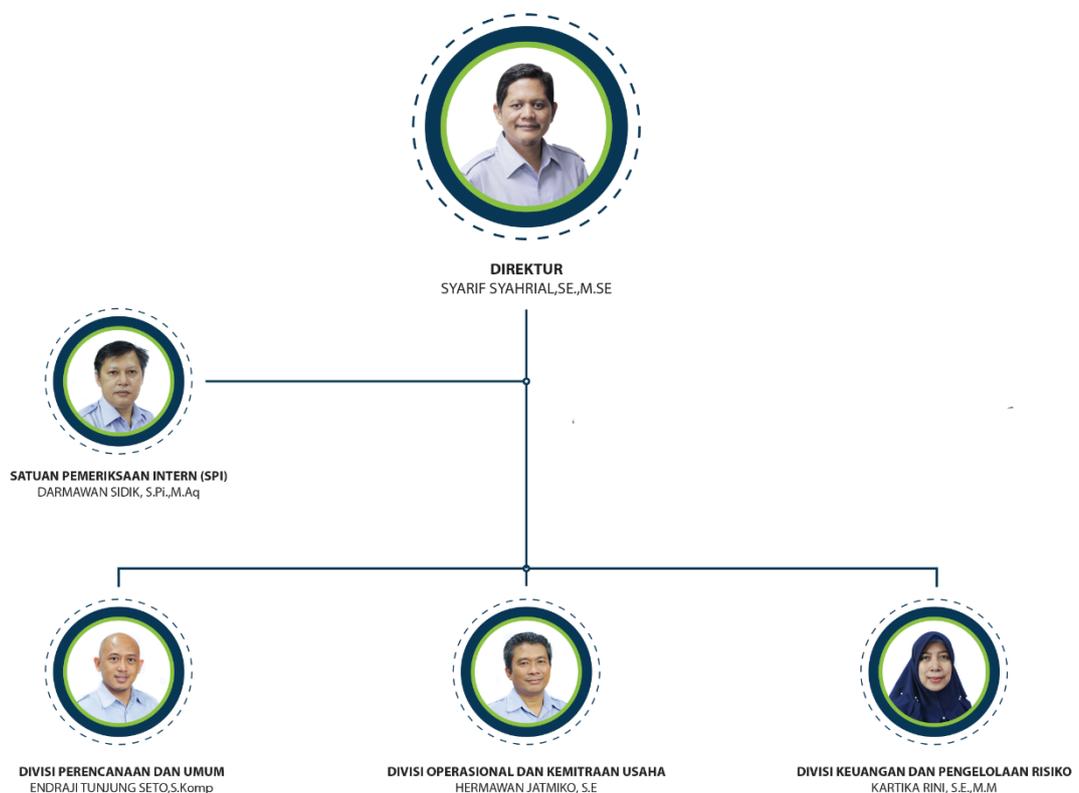
Pejabat pengelola di lingkungan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan terdiri dari:

- a. Direktur selaku Pimpinan BLU LPMUKP;
- b. Pejabat Pengelola Teknis BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Perencanaan dan Umum, serta Divisi Operasional dan Kemitraan;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan BLU LPMUKP yang terdiri dari Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko; dan
- d. Satuan Pemeriksaan Intern BLU LPMUKP.

1.4.3. Direksi dan Manajemen BLU LPMUKP

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, susunan direksi dan manajemen BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Gambar 1.2 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP



Tabel 1.1 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP

No	NAMA	POSISI	NOMOR SK
1.	Syarif Syahril	Direktur	KEP.05/MEN-KP/KP.430/XII/2019
2.	Endraji Tunjung Seto	Kepala Divisi Perencanaan dan Umum	04/KEP-LPMUKP/II/2017
3.	Hermawan Jatmiko	Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha	04/KEP-LPMUKP/II/2017
4.	Kartika Rini	Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko	04/KEP-LPMUKP/II/2017
5.	Darmawan Sidik	Kepala Satuan Pemeriksa Intern	02/KEP-PMUKP/I/2020

1.4.4. Sumber Daya Manusia BLU LPMUKP

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor determinan dalam sebuah organisasi. Kualitas SDM pada suatu organisasi sangat menentukan arah keberhasilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil kinerja yang optimal tentu menuntut adanya dukungan dan manajemen SDM yang prima.

Sebagaimana layaknya institusi yang bergerak di bidang finansial, melaksanakan pengelolaan keuangan, dan dalam rangka persiapan operasional penyaluran dana bergulir, LPMUKP pada 31 Desember 2021 didukung oleh SDM sebanyak 362 orang. LPMUKP terus berusaha secara optimal untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan, dalam rangka tetap memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang profesional, produktif, efektif, dan efisien serta akuntabel guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir. Secara rinci, klasifikasi sumber daya manusia pada LPMUKP dapat dilihat pada **Tabel 1.2** dan **Tabel 1.3** sebagai berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai LPMUKP Tahun 2021

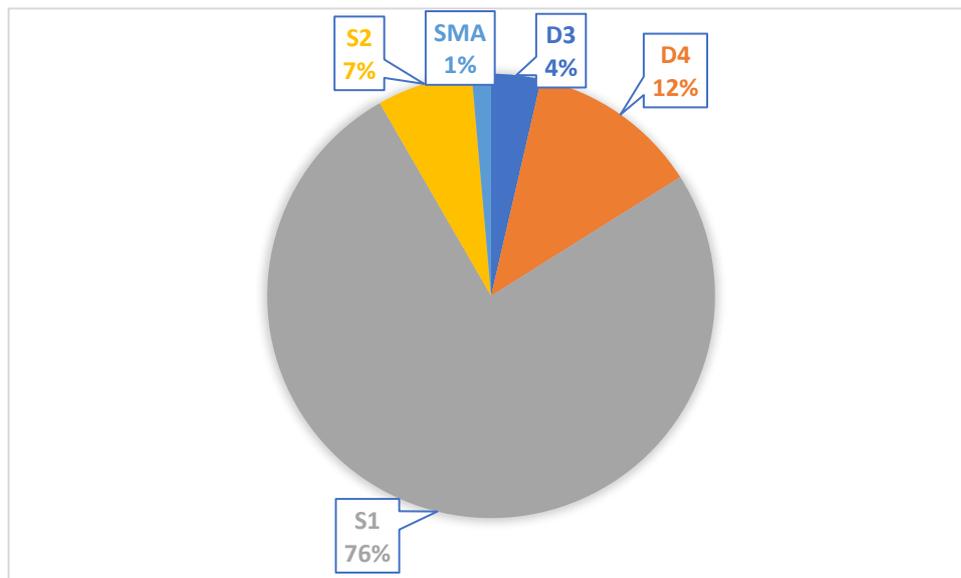
NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	DEWAN PENGAWAS	5
2	PNS	9
3	PEGAWAI BLU NON PNS PROFESIONAL	158
4	KONTRAK	190
Grand Total		362

Tabel 1.3. Klasifikasi SDM LPMUKP

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktur	1
2	Dewan Pengawas	5
3	Kepala Divisi	3
4	Kepala SPI	1
5	Kepala Sub Divisi	6
6	Anggota SPI	1
7	Staf Pelaksana	155
8	Tenaga Kontrak	187
9	Pengemudi	1
10	Pramubakti	2
Grand Total		362

Komposisi SDM LPMUKP, apabila dilihat dari klasifikasi pendidikan, dari 362 pegawai LPMUKP sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Strata Satu yaitu sebanyak 76%, Diploma IV sebanyak 12%, Strata Dua sebanyak 7%, Diploma Tiga sebanyak 4%, dan tenaga pendukung setara SMA sebanyak 1%. Komposisi SDM LPMUKP sesuai dengan klasifikasi pendidikan selengkapnya pada **Gambar 1.2**.

Gambar 1.3. Komposisi Pegawai LPMUKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan



1.5. Visi dan Misi LPMUKP

A. Visi

Menjadi lembaga pengelola modal usaha produktif yang profesional, akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai tujuan ideal yang telah ditetapkan dalam visi tersebut, maka LPMUKP mempunyai misi:

- a. Mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengelola dana modal usaha kelautan dan perikanan secara akuntabel dan transparan;
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan;
- d. Meningkatkan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan terkait pengaturan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan.

1.6. Tugas dan Fungsi LPMUKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017, LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMUKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

1.7. Budaya Organisasi

LPMUKP menerapkan prinsip-prinsip yang senantiasa dijalankan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menjadi budaya yang melekat pada setiap elemen LPMUKP. Hal ini bertujuan agar LPMUKP dapat mencapai kinerja terbaik dan memenuhi ekspektasi yang ada. Prinsip-prinsip dalam tata kelola LPMUKP adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

LPMUKP menerapkan keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi, keterbukaan dalam penyampaian informasi yang jelas, tepat waktu dan diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan serta keterbukaan dalam pengelolaan yang relevan dengan organisasi.

2. Akuntabilitas

LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada LPMUKP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan program pelayanan publik namun juga meliputi akuntabilitas baik dari aspek kegiatan maupun aspek keuangan LPMUKP.

3. Responsibilitas

Pengelola organisasi LPMUKP harus senantiasa memiliki ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat. LPMUKP juga menetapkan tugas dan kewenangan pengelola LPMUKP yang ada, baik melalui Tata Kelola LPMUKP maupun melalui penjabaran lebih lanjut dalam SOP, Juknis dan pengaturan lain yang ada. Seluruh elemen LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

4. Independensi

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan organisasi LPMUKP secara profesional tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai etika dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Adanya prinsip ini memberikan kesadaran kepada seluruh pegawai LPMUKP tentang asas *prudent dan proper* dalam pelaksanaan tugas.

5. Integritas

Prinsip ini berisi komitmen yang tinggi dari LPMUKP untuk mencapai hasil terbaik untuk organisasi melalui pengelola organisasi yang jujur dan kompeten, percaya diri, dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk melaksanakan program-program organisasi. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip kewajaran yang ditunjukkan dengan adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*

LPMUKP yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.8. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Menyajikan uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi LPMUKP termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKJ.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Menyajikan uraian perencanaan kinerja BLU LPMUKP dari sasaran strategis hingga arah dan kebijakan untuk BLU LPMUKP pada Tahun 2021.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menyajikan capaian indikator kinerja utama serta analisis kinerja LPMUKP Tahun 2021.
4. Bab IV Penutup
Menyajikan keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja utama serta upaya perbaikan kedepan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kerja LPMUKP

BLU LPMUKP merupakan Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan status penuh yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710 Tahun 2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tugas BLU LPMUKP adalah melakukan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya untuk mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP maka ditetapkan suatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang juga mengatur tentang tugas dan fungsi BLU LPMUKP sebagai Satker dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tugas utama yaitu melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendukung tugas utama tersebut, LPMUKP diberikan dana kelolaan oleh Kementerian Keuangan sebagai stimulus dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat. Dana kelolaan pertama LPMUKP diterima pada bulan Oktober 2017 dengan jumlah Rp.500 Miliar, kemudian LPMUKP mendapat dana kelolaan tambahan sebesar Rp.850 Miliar di bulan Oktober Tahun 2018, sehingga total dana kelolaan yang dimiliki oleh BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.1,35 Triliun.

Tarif yang dikenakan dalam operasional penyaluran dana bergulir tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (**Tabel 2.1**):

Tabel 2.1. Tarif Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP

PROGRAM	URAIAN
<p>1. Pinjaman Dana Bergulir yang Berpendampingan (Pola Konvensional)</p>	<p>Program layanan BLU LPMUKP berupa pemberian pinjaman dana bergulir yang berpendampingan dari BLU LPMUKP kepada UMKM-KP dengan menggunakan pola konvensional yang disalurkan secara langsung atau melalui LKM-KP/LKB/LKBB sebagai <i>executing</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat suku bunga dari BLU LPMUKP langsung ke UMKM-KP adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun. b. Tingkat suku bunga dari BLU LPMUKP kepada LKM-KP/LKB/LKBB adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) paling tinggi sebesar 4% (empat persen) per tahun. c. Tingkat suku bunga dari LKM-KP/LKB/LKBB kepada UMKM-KP adalah tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Paling tinggi 7% (tujuh persen) per tahun bagi UMKM-KP yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang lebih rendah atau sama dibandingkan rata-rata IKK seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS); dan/atau 2) Paling tinggi $4\% + \left(\frac{IKK_i}{IKK_n}\right) \times 3\%$ per tahun bagi UMKM-KP yang berlokasi di kabupaten/kota dengan nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata IKK seluruh kabupaten/kota di Indonesia menurut publikasi terakhir Badan Pusat Statistik (BPS);
<p>2. Pembiayaan Dana Bergulir yang Berpendampingan (Pola Syariah)</p>	<p>Program layanan BLU LPMUKP berupa pemberian pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan dari LPMUKP kepada UMKM-KP dengan menggunakan pola syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sebagai <i>executing</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara BLU LPMUKP dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. 2) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara BLU LPMUKP dengan LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. 3) Nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. b. Nisbah pembiayaan <i>musyarakah</i> (pembiayaan bersama bagi hasil) antara LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah dengan UMKM-KP adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih. c. Margin pembiayaan <i>murabahah</i> (pembiayaan jual beli) yang dikenakan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah kepada

PROGRAM	URAIAN
	<p>UMKM-KP persentase dari harga beli berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak;</p> <p>d. Nilai <i>ujroh</i> dalam pembiayaan <i>ijarah</i> (pembiayaan sewa) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP.</p> <p>e. Nilai <i>ujroh</i> dalam pembiayaan <i>ijarah mumtahiya bit-tamlik</i> (pembiayaan <i>leasing</i>) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP.</p> <p>f. Nilai <i>ujroh</i> biaya gadai dalam pembiayaan <i>rahn</i> (pembiayaan sistem gadai) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP</p> <p>g. Pola syariah lainnya yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ditentukan oleh LKMS-KP/LKB Syariah/LKBB Syariah sesuai kesepakatan dengan UMKM-KP</p>
<p>3. Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir</p>	<p>Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir merupakan pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikenakan satu kali pada saat penandatanganan akad pembiayaan dana bergulir Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bentuk penggantian biaya provisi, administrasi, dan asuransi¹ yang timbul dari penandatanganan akad pembiayaan dana bergulir dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan dengan menggunakan pola konvensional atau syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank sebagai <i>executing</i>.</p> <p>Tarif provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir sebagaimana dimaksud terdiri atas:</p> <p>a. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>b. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>c. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola konvensional dari lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank/ lembaga keuangan bukan bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembiayaan.</p> <p>d. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola</p>

PROGRAM	URAIAN
	<p>Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p> <p>e. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p> <p>f. Provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir pola syariah dari lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan nilai Rupiah.</p>

A. Rencana Anggaran

LPMUKP merencanakan terkait anggaran setiap tahunnya, rencana anggaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka penyaluran dana bergulir. Tahun 2021 BLU LPMUKP tidak menerima anggaran rupiah murni dari Bagian Anggaran KKP (BA 032 KKP). LPMUKP hanya menggunakan anggaran yang bersumber dari proyeksi pendapatan PNBPU BLU sebesar Rp.32.000.000.000,00 dari target penerimaan PNBPU Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.42.682.453.000,00. Anggaran sebesar Rp.32.000.000.000,00 tersebut, diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional layanan LPMUKP hingga akhir Tahun 2021, sehingga LPMUKP menggunakan saldo kas BLU sebesar Rp.22.340.501.000,00 guna memenuhi kebutuhan anggaran LPMUKP. Total anggaran yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp.54.340.501.000,00.

Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target pengelolaan dana bergulir dengan target penyaluran sebesar Rp.600 Miliar dan target pemanfaat penerima pinjaman dana bergulir sebanyak 13.100 Orang.

Tabel 2.2 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Volume Satuan	Target (dalam Rp. ribu)
66056	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	IKU Program: 1. Persentase PNBP BLU 2. Persentase Penyaluran Dana Bergulir		
032.01.01	Program: Program Dukungan Manajemen		
6453	Kegiatan: Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	Indikator Kinerja Kegiatan: 1. Tersedianya Layanan Penyaluran Modal Usaha 2. Realisasi Pemanfaat Penerima Modal Usaha 3. Rasio Piutang Bermasalah Terhadap <i>Outstanding</i> Dana Bergulir		
6453.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	10.270	2.644.655
	Belanja Barang:	Pemanfaat	
	-RM		-
	-BLU		2.644.655
6453.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1	256.170
	Belanja Barang:	Layanan	
	-RM		-
	-BLU		256.170
6453.EAC	Layanan Umum	1	27.400.076
	Belanja Barang:	Layanan	
	-RM		
	-BLU		27.400.076
6453.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	1.699.099
	Belanja Barang:	Laporan	
	-RM		
	-BLU		1.699.099
TOTAL BELANJA LPMUKP			32.000.000

Tabel 2.3 Rincian Pembiayaan Program dan Kegiatan LPMUKP

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Volume Satuan	Target (dalam Rp. ribu)
66056	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	IKU Program:		
	1. Persentase PNBP BLU		
	2. Persentase Penyaluran Dana Bergulir		
032.01.01	Program: Program Dukungan Manajemen		
6453	Kegiatan: Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		
	Indikator Kinerja Kegiatan:		
	3. Tersedianya Layanan Penyaluran Modal Usaha		
	4. Realisasi Pemanfaat Penerima Modal Usaha		
	5. Rasio Piutang Bermasalah Terhadap <i>Outstanding</i> Dana Bergulir		
6453.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	13.100	5.956.160
	Belanja Barang:	Pemanfaat	
	-RM		-
	-BLU		5.756.160
	Belanja Modal:		
	-RM		
	-BLU		200.000
6453.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1	861.630
	Belanja Barang:	Layanan	
	-RM		-
	-BLU		861.630
	Belanja Modal:		
	-RM		
	-BLU		-
6453.EAC	Layanan Umum	1	45.237.918
	Belanja Barang:	Layanan	
	-RM		
	-BLU		44.226.368
	Belanja Modal:		
	-RM		
	-BLU		1.011.550
6453.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	2.284.793
	Belanja Barang:	Laporan	
	-RM		
	-BLU		2.204.793
	Belanja Modal:		
	-RM		
	-BLU		80.000
TOTAL BELANJA LPMUKP			54.340.501

B. Target Kinerja Penyaluran

Pada tahun 2021 diharapkan LPMUKP mampu memenuhi penyaluran alokasi dana bergulir sebesar Rp. 600 Miliar dari asumsi total dana kelolaan yang belum tersalurkan. Dari dana kelolaan dana tersebut, diharapkan mampu diserap dan disalurkan melalui Mitra UMKM-KP. Dampak langsung yang diharapkan dari penyaluran dana bergulir LPMUKP ini, selain dapat memperkuat permodalan bagi Koperasi/LKM dan UKM, juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar perikanan, usaha garam

rakyat serta usaha masyarakat pesisir lainnya. Gambaran jumlah potensi KUKP tahun 2021 sesuai tipologi jenis kelompok usaha dan kebutuhan alokasi dananya dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4. Jumlah Potensi Target Pemanfaat Dana Bergulir LPMUKP

Jenis Kelompok Usaha	Jumlah Potensi Pelaku Usaha KP*	Realisasi Pemanfaat Sasaran LPMUKP 2020	Target Pemanfaat Sasaran LPMUKP 2021	Estimasi Rata-rata Alokasi per Pemanfaat** (Rp Ribu)	Total Kebutuhan Alokasi (Rp Juta)
Perikanan Tangkap	1.372.530	1.750	6.471	30.596	198.000
Budidaya Perikanan	1.634.597	1.026	3.097	83.318	258.000
Pengolah dan Pemasar	45.421	1.242	2.540	47.243	120.000
Usaha Garam Rakyat dan Usaha Masyarakat Pesisir	7.867	270	992	24.183	24.000
Total	3.060.415	4.288	13.100		600.000

(2) * Jumlah potensi pelaku usaha yang digunakan berdasarkan data dari Dashboard Kartu Pelaku Usaha\KUSUKA) KP

(3) **Nilai estimasi rata-rata alokasi per pemanfaat diperoleh berdasarkan data realisasi penyaluran per 31 Desember 2020

A. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada tahun 2021, diproyeksikan total pendapatan BLU LPMUKP yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan penyaluran dana bergulir adalah sebesar Rp.42,68 Miliar. Proyeksi pendapatan tersebut merupakan total target pendapatan dana bergulir BLU. Rincian proyeksi pendapatan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5. Proyeksi Pendapatan LPMUKP Tahun 2021

PENDAPATAN LPMUKP	TARGET (dalam Rp. ribu)
Penerimaan RM	-
Pendapatan Jasa Layanan (BLU)	42.682.453
1. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektor	27.725.104
2. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	9.332.349
3. Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	5.625.000
4. Pendapatan Hibah BLU	-
5. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-
TOTAL	42.682.453

2.2. Perjanjian Kinerja

Setiap tahun BLU LPMUKP wajib menyusun dokumen *Key Performance Indicator* (KPI) yang berisi tentang target kinerja BLU LPMUKP dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Direktorat Pembina Keuangan Badan Layanan Umum untuk diverifikasi terlebih dahulu kemudian barulah dilakukan pembahasan terkait dengan target kinerja yang tertuang dalam dokumen usulan KPI dimaksud.

Pada Tahun 2021, Direktur LPMUKP menandatangani perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal KKP, dengan rincian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.6 Target Kontrak Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	1	Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum (Rp.)	42 Miliar
		2	Realisasi Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Pemanfaat)	13.100
		3	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	600 Miliar
		4	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 5
2	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	5	Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	90
		6	Modernisasi BLU (%)	100
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP (Nilai)	91
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	86
		9	Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	84
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2019 lingkup BLU LPMUKP (%)	100
		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	65

a. Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang dikelola oleh BLU, yang berasal dari pendapatan layanan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan, dan pendapatan non layanan yang diperoleh dari hasil optimalisasi/pemanfaatan surplus kas dan/atau dana kelolaan dalam investasi jangka pendek berisiko rendah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Realisasi PNBPN BLU dihitung untuk PNBPN yang disahkan ke Kuasa Bendahara Umum Negara.

b. Realisasi Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP

Realisasi pemanfaat pinjaman dana bergulir merupakan jumlah realisasi penerima dana bergulir dari BLU LPMUKP sesuai dengan daftar nominatif yang diajukan dalam proposal dan disetujui berdasarkan rapat pembahasan komite pinjaman.

c. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

Realisasi penyaluran dana bergulir adalah jumlah nilai rupiah atas dana kelolaan yang disalurkan sampai ke debitur (*end user*) selama tahun 2021 baik untuk penerima baru maupun penerima lama.

d. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah perbandingan antara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancar, diragukan dan macet) dengan *outstanding* Piutang Dana Bergulir untuk penyaluran pinjaman sejak tahun 2017 hingga tanggal 31 Desember 2021.

e. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP

Persentase realisasi anggaran BLU LPMUKP merupakan persentase atas realisasi belanja anggaran yang dilakukan LPMUKP sepanjang Tahun Anggaran 2021.

f. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Modernisasi pengelolaan BLU adalah upaya penerapan teknologi informasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja BLU, yang antara lain mencakup pemanfaatan BIOS, penggunaan Aplikasi Persuratan, dan pengintegrasian basis data (database) dana bergulir dengan Sistem Informasi Kredit Program.

g. Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP

Nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan dokumen SAKIP dengan menilai beberapa aspek yaitu aspek kepatuhan, aspek kesesuaian serta aspek ketercapaian.

h. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP

Penilaian kinerja anggaran berdasarkan pengukuran aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks dengan melakukan penginputan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulannya, dilakukan monev setiap triwulan dan Penilaian pada akhir tahun.

i. Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup Sekretariat Jenderal dilakukan atas (i) tingkat *sharing* dokumen mandatory; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP.

j. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2020 lingkup BLU LPMUKP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

k. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2020 s.d. 30 Septemebr 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja LPMUKP

3.1.1. Pencapaian Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik untuk Indikator Kinerja utama dengan periode pengukuran Triwulanan, Semesteran dan Tahunan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja Utama dimaksud. Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Kinerja dimaksudkan agar Lembaga dapat terus mengawasi/memonitoring pelaksanaan kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja LPMUKP pada setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dilakukan untuk menjabarkan realisasi pada setiap indikator kinerja utama, permasalahan, dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkup BLU LPMUKP. Analisis capaian kinerja tersebut juga disandingkan dan dibandingkan dengan capaian indikator kinerja pada Tahun Anggaran sebelumnya. Capaian perjanjian kinerja BLU LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	1	Realisasi PNBP Badan Layanan Umum (Rp.)	42 Miliar	56 Miliar	131,29
		2	Realisasi Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Pemanfaat)	13.100	6.888	52,58
		3	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	600 Miliar	270 Miliar	45,09
		4	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 5	2,92	100
2	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	5	Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	90	91,51	101,68
		6	Modernisasi BLU (%)	100	97	97
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP (Nilai)	91	93,68	102,95
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	86	78,83	91,14
		9	Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	84	97,45	116,01
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2019 lingkup BLU LPMUKP (%)	100	100	100
		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP	65	100	153,85

A. Realisasi PNBP BLU

Sesuai dengan yang tercantum pada dokumen kontrak kinerja antara BLU LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, target realisasi pendapatan PNBP BLU adalah sebesar Rp.42 miliar, pendapatan tersebut berasal dari:

- 1) Pendapatan jasa layanan perbankan BLU
- 2) Pendapatan tarif pembiayaan dana bergulir
- 3) Pendapatan provisi dan administrasi pembiayaan dana bergulir.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dihitung berdasarkan realisasi pendapatan yang diperoleh dan dikelola BLU LPMUKP yang terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2021, yang kemudian diajukan pengesahannya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Capaian ini dihitung dengan polarisasi indikator kinerja *maximize* dimana semakin tinggi realisasi PNBP maka nilainya semakin baik. Realisasi PNBP tersebut dihitung menggunakan komposisi perhitungan dengan menambahkan pendapatan Jasa Layanan (Pendapatan tarif pembiayaan dana bergulir, pendapatan provisi dan administrasi) dan pendapatan Non Jasa Layanan (Pendapatan jasa layanan perbankan BLU). Sumber data yang digunakan untuk mengukur validitas capaian ini adalah menggunakan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Data SP3B untuk pengesahan PNP dalam aplikasi OM SPAN. Untuk lebih jelasnya, panduan perhitungan realisasi PNBP adalah sebagai berikut:

**Realisasi PNBP BLU = Realisasi Pendapatan Jasa Layanan + Realisasi
Pendapatan Non Jasa Layanan**

$$\text{Capaian Realisasi PNBP BLU} = \frac{\text{Realisasi PNBP BLU}}{\text{Target PNBP BLU}} \times 100\%$$

Realisasi pendapatan PNBP Tahun 2021 adalah sebesar Rp.56.038.640.057,00 yang terdiri dari hasil pendapatan jasa layanan sebesar Rp.19.779.526.425,00, selain itu BLU LPMUKP juga memperoleh pendapatan non jasa layanan sebesar Rp.36.259.113.632,00. Dengan demikian total pencapaian kinerja LPMUKP untuk realisasi PNBP BLU berdasarkan cara perhitungan dalam manual IKU adalah sebesar **131,29%**. Rincian target PNBP perbulan serta cara perhitungan realisasi PNBP sesuai dengan manual IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian PNBP BLU per Bulan

Bulan	424911	424134	424139	PNBP
	pendapatan jasa layanan perbankan BLU	pendapatan program dana bergulir sektoral	pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya	
Januari	14.209.512.343	1.205.840.288	296.040.000	15.711.392.631
Februari	1.606.343.371	1.308.621.310	648.600.000	3.563.564.681
Maret	1.510.490.958	1.405.845.003	358.110.000	3.274.445.961
April	1.575.721.581	498.859.253	199.660.000	2.274.240.834
Mei	732.288.135	1.051.181.475	163.320.000	1.946.789.610
Juni	2.577.012.317	1.409.717.672	297.232.500	4.283.962.489
Juli	2.513.784.875	1.635.866.116	150.585.000	4.300.235.991
Asgustus	2.203.044.167	1.008.746.062	527.172.500	3.738.962.729
September	2.484.906.063	1.262.480.072	283.438.375	4.030.824.510
Oktober	2.071.270.491	1.176.684.119	245.010.000	3.492.964.610
November	1.735.561.990	1.484.612.310	234.750.000	3.454.924.300
Desember	3.039.177.341	2.345.979.370	581.175.000	5.966.331.711
Total	36.259.113.632	15.794.433.050	3.985.093.375	56.038.640.057

$$\begin{aligned} \text{Realisasi PNBP BLU} &= 19.779.526.425 + 36.259.113.632 \\ &= \mathbf{56.038.640.057} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi PNBP BLU} &= \frac{56.038.640.057}{42.682.453.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{131,29\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan data perhitungan capaian kinerja IKU realisasi PNBP BLU, secara umum IKU tersebut telah tercapai dengan realisasi sebesar **Rp.56.038.640.057,00** nilai capaian sebesar **131,29%**, proporsi realisasi PNBP BLU Tahun 2021 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari non jasa layanan sebagai akibat belum optimalnya realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP di tengah kondisi pandemi covid-19 yang juga sempat mengalami lonjakan kasus pada periode Triwulan II dan Triwulan III.

Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP BLU pada Tahun Anggaran selanjutnya, LPMUKP akan melakukan pemilihan mitra kerjasama bisnis terkait dengan penempatan dana kelolaan melalui mekanisme *beauty contest*. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, LPMUKP tetap memperoleh pendapatan non jasa layanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemudian, untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, LPMUKP juga akan terus melaksanakan optimalisasi dan percepatan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat agar terus memperoleh pendapatan yang bersumber dari tarif pinjaman serta biaya provisi. Selain itu, LPMUKP dalam memonitoring risiko atas pengembalian

dan pembayaran tarif layanan, akan terus melakukan penagihan kepada para debitur melalui tenaga pendamping serta pemanfaatan teknologi informasi melalui sms blast.

Secara nominal, pendapatan PNBPN BLU pada Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan PNBPN BLU pada Tahun 2021, namun bila dihitung dari sisi persentase capaian PNBPN BLU pada Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2020. Perbandingan realisasi capaian tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian PNBPN

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2021			2020		
			Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Realisasi PNBPN BLU	Rp. 42,68 Miliar	Rp. 56,03 Miliar	131,29	Rp.51 Miliar	Rp.66 Miliar	130,41

B. Realisasi Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP

Pemanfaat pinjaman dana bergulir merupakan daftar nominatif yang menerima penyaluran dana bergulir dari BLU LPMUKP melalui keputusan persetujuan dari rapat komite pinjaman. Pada Tahun 2021, LPMUKP berencana menyalurkan dana bergulir sebesar Rp.600 Miliar kepada sektor usaha kelautan dan perikanan dengan segmen usaha yang terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, usaha garam rakyat serta usaha masyarakat pesisir lainnya. Dari target penyaluran dana bergulir sebesar Rp.600 miliar tersebut LPMUKP memproyeksikan jumlah penerima pemanfaat yang disusun berdasarkan nilai rata-rata penerima pinjaman dana bergulir pada Tahun sebelumnya adalah sebanyak 13.100 Orang. Rincian target pemanfaat penerima dana bergulir per sektor usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Jumlah Potensi Target Pemanfaat Dana Bergulir LPMUKP

Jenis Kelompok Usaha	Jumlah Potensi Pelaku Usaha KP*	Realisasi Pemanfaat Sasaran LPMUKP 2020	Target Pemanfaat Sasaran LPMUKP 2021	Estimasi Rata-rata Alokasi per Pemanfaat** (Rp Ribu)	Total Kebutuhan Alokasi (Rp Juta)
	Perikanan Tangkap	1.372.530	1.750	6.471	30.596
Budidaya Perikanan	1.634.597	1.026	3.097	83.318	258.000
Pengolah dan Pemasar	45.421	1.242	2.540	47.243	120.000
Usaha Garam Rakyat dan Usaha Masyarakat Pesisir	7.867	270	992	24.183	24.000
Total	3.060.415	4.288	13.100		600.000

* Jumlah potensi pelaku usaha yang digunakan berdasarkan data Dashboard Kartu Pelaku Usaha (KUSUKA) KP.

**Nilai estimasi rata-rata alokasi per pemanfaat diperoleh berdasarkan data realisasi penyaluran tahun 2020 per 31 Desember 2020

Sepanjang Tahun Anggaran 2021, LPMUKP telah menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat sektor usaha kelautan dan perikanan sebagai penerima pemanfaat pinjaman dana bergulir LPMUKP sebanyak 6.888 Orang dengan total penyaluran dana bergulir sebesar Rp.270 Miliar. Berdasarkan jumlah realisasi tersebut, maka capaian realisasi pemanfaat pinjaman dana bergulir pada Tahun 2021 adalah sebesar **32,21%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi Pemanfaat} &= \frac{6.888}{13.100} \times 100\% \\ &= \mathbf{32,21\%} \end{aligned}$$

IKU realisasi pemanfaat penerima pinjaman dana bergulir tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini diakibatkan dari dampak penyaluran dana bergulir di Tahun 2021 yang belum terlaksana secara optimal akibat adanya beberapa kendala sehingga LPMUKP tidak dapat menyalurkan dana bergulir secara optimal.

Untuk memperbaiki kinerja penerima pemanfaat pinjaman dana bergulir, pada Tahun Anggaran selanjutnya LPMUKP akan terus memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir, sehingga diharapkan apabila pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir telah dilaksanakan secara optimal, maka capaian kinerja pemanfaat penyaluran dana bergulir pun akan mencapai hasil yang optimal.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi pemanfaat pinjaman dana bergulir pada Tahun 2020, secara umum LPMUKP mengalami kenaikan capaian pada Tahun 2021. Realisasi pemanfaat pinjaman dana bergulir pada Tahun 2020 adalah sebanyak 4.288 Pemanfaat (*End User*) sedangkan pada Tahun 2021 sebanyak 6.888 Pemanfaat (*End User*).

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian PNBP

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2021			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Realisasi Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir (Pemanfaat)	13.100	6.888	52,58	16.960	4.288	25,28

C. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola dana bergulir BLU LPMUKP mendorong pembangunan sektor kelautan dengan penyediaan pembiayaan yang murah dan berpendampingan melalui pelayanan ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam peningkatan produksi dan kualitas dari usaha bidang kelautan dan perikanan. Dalam menterjemahkan tugas pokok ini maka penyaluran dana bergulir menjadi salah satu indikator utama untuk penilaian kinerja BLU LPMUKP. Pada tahun 2021 target kinerja realisasi penyaluran dana bergulir ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Target Penyaluran Dana Bergulir

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
3.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan	Realisasi penyaluran dana bergulir	Rp.600 Miliar

Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan serta menghitung total dana kelolaan yang belum tersalurkan hingga akhir Desember 2020. Dana kelolaan LPMUKP pada tahun 2017 sebesar Rp.500 Miliar, dan pada tahun 2018 LPMUKP mendapat tambahan dana kelolaan sebesar Rp.850 Miliar pada bulan Oktober. Kemudian hingga 31 Desember 2021 LPMUKP telah menyalurkan dana kelolaan sebesar Rp.872,61 Miliar.

Sepanjang Tahun Anggaran 2021, BLU LPMUKP telah menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.270.553.725.000,00 dengan pemanfaat penerima pinjaman sebesar 6.888 orang dan rata-rata pinjaman mencapai Rp.39.278.996,00 per orang. Perhitungan capaian realisasi penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi PNBP BLU} = \frac{\text{Realisasi Penyaluran DB}}{\text{Target Penyaluran DB}} \times 100\%$$

Realisasi penyaluran dana bergulir Tahun 2021, disalurkan kepada beberapa segmen usaha di sektor kelautan dan perikanan yang secara detail dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Per Sektor Usaha

Sektor Usaha	Realisasi (Rp)	Pemanfaat (Org)	Rata2 Per org
Perikanan Budidaya	146.537.725.000	2.734	53.422.430
Perikanan Tangkap	64.830.000.000	2.002	32.382.617
Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	50.799.000.000	2.071	24.528.730
Usaha Garam Rakyat	7.662.000.000	37	207.081.081
Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	725.000.000	35	20.714.286
TOTAL	270.553.725.000	6.888	39.278.996

Berdasarkan tabel tersebut, maka capaian realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2021 sesuai dengan perhitungan manual IKU, realisasi capaian IKU penyaluran dana bergulir adalah sebesar 45,09% dari target penyaluran dana bergulir Tahun 2021 sebesar Rp.600 Miliar.

$$\begin{aligned}\text{Capaian Realisasi PNB BLU} &= \frac{270.553.725.000}{600.000.000.000} \times 100\% \\ &= 45,09\%\end{aligned}$$

Realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan secara optimal, akibatnya realisasi pada IKU penyaluran dana bergulir tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi penyaluran dana bergulir hanya mencapai 45,01% dari target sebesar 100%, hal ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi diantaranya:

- Pengaruh kondisi pandemi *covid-19* yang masih berlangsung pada Tahun Anggaran 2021 dan terjadi lonjakan kasus pandemi *covid-19* yang terjadi pada periode Semester II Tahun 2021 yang tentunya mengakibatkan performa penyaluran dana bergulir LPMUKP kurang optimal pada Tahun Anggaran 2021.
- Terdapat perubahan kebijakan dalam pelaksanaan proses bisnis, dimana LPMUKP harus melibatkan Unit Eselon I Teknis dalam pelaksanaan komite pinjaman dan pengambilan keputusan pada pinjaman dana bergulir yang bernilai lebih dari Rp.50.000.000,00. Kondisi tersebut tentunya berpengaruh terhadap performa penyaluran dana bergulir dikarenakan proses bisnis tersebut masih terbilang baru untuk diterapkan dan masih harus melalui tahapan percobaan dan penyusunan jadwal pembahasan yang sesuai dikarenakan melibatkan pihak selain internal LPMUKP.

- c) Terdapat kendala pada pelaksanaan akad kredit dimana masih terdapat debitur LPMUKP yang belum memahami dengan benar terkait dengan persyaratan akad. Selain itu, terdapat pula masalah pada bank dan notaris mitra LPMUKP yang memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan capaian IKU Realisasi Penyaluran Dana Bergulir pada Tahun Anggaran 2021, LPMUKP akan melaksanakan beberapa rencana aksi untuk mendorong penyaluran dana bergulir, dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) LPMUKP akan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi guna mendukung pelaksanaan proses bisnis penyaluran dana bergulir dalam kondisi pandemi *covid-19* sehingga proses pelaksanaan penyaluran dana bergulir tetap dapat dilaksanakan.
- b) Melakukan penyusunan jadwal komite dengan Unit Eselon I Teknis KKP secara berkala guna mendorong percepatan penyaluran guna menghindari penundaan pembahasan komite pinjaman.
- c) LPMUKP akan melaksanakan koordinasi aktif dengan pihak bank mitra dan notaris di daerah yang terlibat dalam pelaksanaan akad serta memperluas jangkauan pelaksanaan akad tersebut dengan perluasan kerjasama dengan notaris dan bank mitra di daerah. Selain itu, LPMUKP juga akan melakukan transfer informasi kepada para calon debitur LPMUKP baik secara langsung maupun tidak langsung (pemanfaatan teknologi informasi).

Capaian IKU realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2021 adalah sebesar 45,09%. Capaian tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan jumlah capaian realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun 2020 yang hanya mencapai 26,58% dengan total penyaluran dana bergulir sebesar Rp.192 Miliar.

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IKU Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir	Rp.725 Miliar	Rp.192 Miliar	26,58	Rp.600 Miliar	Rp.270 Miliar	45,09

D. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

LPMUKP mengemban misi di bidang ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui penguatan permodalan UMKM, dimana sasaran langsung (sebagian besar koperasi/LKM) dan tidak langsung/*end user* (sebagian besar anggota koperasi) dimungkinkan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, LPMUKP dalam menetapkan NPL mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kami memandang perlu adanya penetapan istilah NPL (*Non Performing Loan*) seperti lazimnya digunakan pada lembaga perbankan/lembaga keuangan untuk pengukuran kinerja pinjaman/pembiayaan bermasalah yang dilakukan. Untuk itu, LPMUKP mengusulkan dalam rangka mengukur kinerja pinjaman/pembiayaan, dilakukan melalui penetapan Kolektibilitas Dana Bergulir.
- 2) Kolektibilitas Dana Bergulir adalah pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan mitra dalam rangka mendapatkan informasi tentang kualitas pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir.
- 3) Pengklasifikasian pinjaman/pembiayaan adalah penggolongan kualitas pengembalian pinjaman/pembiayaan dan/atau pembayaran Tarif/Imbal Jasa dari pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPMUKP dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan kondisi dari pinjaman/pembiayaan yang telah diberikan.
- 4) Pada Tahun 2021, LPMUKP menentukan perhitungan Kolektibilitas Dana Bergulir dalam bentuk klasifikasi piutang mulai dari Kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Rasio Dana Bergulir Diragukan adalah perbandingan antara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancar, diragukan, macet) dengan outstanding piutang dana bergulir untuk penyaluran pinjaman sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Tujuan dari perhitungan capaian IKU ini adalah untuk menjaga kualitas atau tingkat kesehatan pinjaman atas dana bergulir dengan polarisasi indikator kinerja Minimize (semakin rendah capaian semakin baik). Penilaian capaian kinerja rasio dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.9. Klasifikasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

No	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (RDBDT)	Capaian Kinerja
1	RDBDT = 0%	150%
2	0% < RDBDT ≤ 1%	120%
3	1% ≤ RDBDT ≤ 2%	110%
4	2% ≤ RDBDT ≤ 5%	100%
5	5% ≤ RDBDT ≤ 8%	80%
6	8% ≤ RDBDT ≤ 12%	60%
7	RDBDT ≥ 12%	50%

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 131/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Kodefikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012, dirumuskan acuan sebagai berikut:

- 1) Perhitungan rasio *Non Performing* (NPF) adalah Pembiayaan (KL, D, M)/ Total Pembiayaan.
- 2) Pembiayaan (KL, D, M) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- 3) Peringkat Komposisi Bank yang dikategorikan secara umum sangat sehat dan secara umum sehat, adalah yang antara lain memnuhi rasio NPF kurang dari 5%.

Kemudian penentuan kualitas piutang didasarkan pada klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, sebagai berikut:

Tabel. 3.10. Klasifikasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Klasifikasi	Keterangan	Penyisihan
Lancar	Untuk investasi tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	0,5%
Kurang Lancar	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	10%
Diragukan	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran	50%
Macet	Untuk investasi dengan tunggakan lebih dari 240 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya.	100%

Tabel 3.11 Realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi*
4.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih	Maksimal 5 %	2,92 %

*Realisasi Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan data realisasi dari Laporan Keuangan Tahun 2021 Unaudited

Berdasarkan hasil capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih, LPMUKP masih bisa mempertahankan persentase capaian tersebut hingga dibawah 5%, dan capaian tersebut mengalami penurunan pada angka rasio dana bergulir diragukan tertagih, sesuai dengan polarisasi pada IKU rasio dana bergulir diragukan tertagih dengan polarisasi minimize maka capaian IKU pada Tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2020.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Rasio Dana Bergulir diragukan Tertagih	< 5%	3,01%	100	< 5%	2,92%	100

Penurunan angka rasio dana bergulir diragukan tertagih disebabkan oleh adanya upaya penanganan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh BLU LPMUKP sepanjang Tahun Anggaran 2021. Keberhasilan capaian rasio dana bergulir diragukan tertagih merupakan suatu upaya LPMUKP dalam menerapkan manajemen risiko dari pelaksanaan proses verifikasi kelayakan usulan pinjaman, penilaian usulan pinjaman oleh komite, hingga penanganan pinjaman bermasalah, bagi debitur yang memang mengalami gagal produksi akibat faktor kondisi eksternal seperti bencana alam maupun dikarenakan adanya pandemi *covid-19*.

Selanjutnya, untuk menekan angka rasio dana bergulir diragukan tertagih LPMUKP akan terus melakukan upaya dalam penerapan manajemen risiko serta penanganan pinjaman bermasalah.

Realisasi IKU rasio dana bergulir diragukan tertagih secara umum menunjukkan hasil yang baik, dikarenakan adanya penurunan jumlah rasio dana bergulir diragukan tertagih, namun secara nilai capaian, realisasi IKU tersebut mendapatkan kalisifikasi nilai yang sama yaitu 100%.

E. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP

BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja operasional sebesar Rp.54.340.501.000,00 yang seluruhnya bersumber dari PNBP BLU baik penggunaan proyeksi PNBP Tahun Berjalan maupun penggunaan saldo kas BLU. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional dana bergulir LPMUKP sepanjang Tahun 2021.

Dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2021, LPMUKP termasuk ke dalam program Dukungan Manajemen (032.01) dengan kegiatan Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (6453) dengan Empat Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu KRO Fasilitas dan Pembinaan UMKM (6453.BDG), KRO Pengawasan dan Pengendalian Layanan (6453.BIF), KRO Layanan Umum (6453.EAC) dan KRO Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (6453.FAE).

Periode pelaporan IKU ini adalah setiap Triwulan dengan polarisasi capaian *maximize* dimana semakin tinggi capaian maka semakin baik. Perhitungan capaian persentase realisasi anggaran BLU LPMUKP berdasarkan manual IKU Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

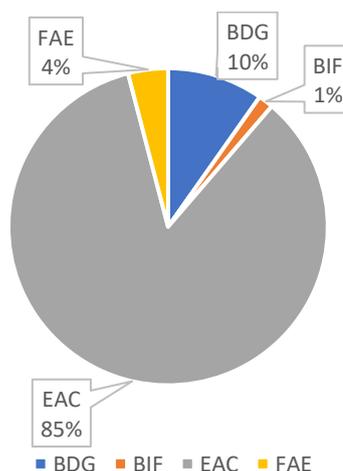
$$\text{Capaian Persentase Realisasi Anggaran} = \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\% \right) / 90\%$$

Sepanjang Tahun Anggaran 2021, BLU LPMUKP telah merealisasikan anggaran belanja sebesar Rp.49.729.163.766,00 dari pagu anggaran total sebesar Rp.54.340.501.000,00 dalam rangka mendukung kegiatan penyaluran dana bergulir LPMUKP. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran LPMUKP berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran LPMUKP per 31 Desember 2021

Kode	Program/Aktivitas/ KRO/ RO/ Komponen/ Subkomp/ Detil	Jumlah Biaya	Realisasi	Persentase
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	54.340.501.000	49.729.163.766	91,51%
6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	54.340.501.000	49.729.163.766	91,51%
6453.BDG	Fasilitas dan Pembinaan UMKM	5.956.160.000	4.854.104.600	81,50%
6453.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	813.630.000	765.884.900	94,13%
6453.EAC	Layanan Umum	45.285.918.000	42.092.677.466	92,95%
6453.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2.284.793.000	2.016.546.800	88,26%

Gambar 3.1 Grafik Realisasi Anggaran per Output



Capaian realisasi anggaran LPMUKP secara total sesuai dengan perhitungan pada dokumen manual IKU adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Persentase Realisasi Anggaran} &= \left(\frac{49.279.163.766}{54.340.501.000} \times 100\% \right) / 90\% \\
 &= 91,51\% / 90\% \\
 &= 101,68\%
 \end{aligned}$$

Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2020 dengan realisasi anggaran sebesar **75,74%** maka realisasi anggaran pada Tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan dengan nilai persentase realisasi **91,51%**. Terjadi kenaikan capaian pada Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran LPMUKP sebesar **20,82%**.

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.	Tatakelola Pemerintah yang Baik lingkup LPMUKP	Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP	90%	75,74%	84,16	90%	91,51%	101,68

Realisasi anggaran LPMUKP pada Tahun Anggaran 2021 sudah termasuk optimal, hal ini juga tercerminkan dari adanya peningkatan capaian kinerja LPMUKP sebesar **20,82%** jika dibandingkan dengan capaian persentase realisasi anggaran Tahun 2020. Keberhasilan capaian kinerja pada persentase realisasi anggaran BLU LPMUKP didukung dengan adanya optimalisasi pelaksanaan melalui revisi DIPA guna menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran yang telah dibuat.

Selanjutnya dalam mendukung pelaksanaan persentase realisasi anggaran, pada Tahun 2022 LPMUKP akan melakukan penyusunan timeline pelaksanaan anggaran serta rencana penarikan anggaran guna optimalisasi penyerapan anggaran.

F. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

Good governance, actual, transparan dan akuntabel merupakan komponen yang ingin dicapai dalam sistem pemerintahan yang modern. Tuntutan terhadap efektifitas pelayanan publik menjadi dasar untuk BLU LPMUKP untuk melakukan modernisasi pengelolaan BLU untuk meningkatkan *performance* dalam pelayanan publik. Mengingat pentingnya modernisasi pengelolaan BLU maka kegiatan ini menjadi indikator utama kinerja lembaga BLU LPMUKP. Modernisasi Pengelolaan BLU dalam tahun 2021 adalah upaya untuk menerapkan teknologi informasi dalam

pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja, yang antara lain mencakup optimalisasi penggunaan BIOS, ketersediaan website sebagai sumber informasi, ketersediaan dashboard terkait dengan kegiatan penyaluran dana bergulir, pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU, serta komponen modernisasi pengelolaan BLU lainnya selama kurun waktu 01 Januari s.d. 31 Desember 2021. Untuk itu ditetapkan target kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 3.15 Target Modernisasi Pengelolaan BLU

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
6.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100 %

Pembenahan terhadap sistem pendataan dan digitalisasi pelayanan baik penyediaan informasi maupun pengolahan data dan pelaporan merupakan sasaran dalam modernisasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi tentang ruang lingkup dan pelayanan publik yang disediakan oleh BLU LPMUKP.

Dalam perhitungan indikator kinerja utama ini digunakan formula persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2021 berdasarkan kelengkapan tahapan dan kecepatan penyelesaian tahapan modernisasi. Satuan pengukuran yang digunakan adalah persentase dengan konsolidasi periode berdasarkan catatan terakhir dengan polarisasi indikator *miximize* yaitu semakin tinggi capaian semakin baik dengan periode pelaporan satu tahun.

Dari perhitungan terhadap komponen penilaian kinerja diatas maka dapat disampaikan realisasi kinerja untuk indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Target Modernisasi Pengelolaan BLU

Urutan Tahapan	Variabel Tahapan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Operasionalisasi Aplikasi BIOS	15	15	15
2.	Ketersediaan Website yang representatif	10	9	9
3.	ketersediaan database yang terpusat	10	7	7
4.	Ketersediaan dashboard intern dan ekstern	10	10	10
5.	Ketersediaan webservice untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	50	11	11
6.	Ketersediaan SOP terkait dengan sistem yang memanfaatkan Teknologi Informasi	10	9	9
7.	Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10	10	10
8.	Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	10	10	10

Capaian Tambahan				
1.	Kelengkapan Pengisian Data BIOS	15	15	15
2.	Ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS (sesuai dengan peraturan dan/atau surat permintaan dari Direktorat PPKBLU)	10	0	0
Total Capaian				97

1) Operasionalisasi Aplikasi BIOS

BLU Integrated Online System (BIOS) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat PPK BLU dengan tujuan agar seluruh BLU di Indonesia dapat terintegrasi dengan satu sistem terutama terkait dengan data layanan, profil dan informasi BLU, serta data-data yang dinilai perlu disediakan oleh BLU serta proses pembinaan oleh PK BLU seluruhnya dilaksanakan melalui satu sistem yaitu dalam aplikasi BIOS yang berbasis web.

Dalam pencapaian variabel operasionalisasi aplikasi BIOS, LPMUKP telah melakukan pengisian terkait dengan data-data yang perlu diunggah ke dalam aplikasi BIOS tersebut. Data tersebut meliputi pengisian profil BLU, pengisian data layanan, tindak lanjut atas pembinaan, pengelolaan kinerja, pengisian data keuangan, pengisian data RSB dan RBA serta modul dokumentasi sebagai wadah atau media dalam pengunggahan dokumen yang harus disertakan namun tidak termuat dalam modul yang tersedia.

2) Ketersediaan Website yang Representatif

Dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan LPMUKP kepada khalayak umum melalui pemanfaatan teknologi informasi, maka diperlukan adanya suatu media yang memuat terkait dengan layanan dan aktivitas LPMUKP. Ketersediaan website LPMUKP yang representatif menunjukkan bahwa aktivitas dan layanan LPMUKP dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir terus dilakukan secara terus menerus. Website LPMUKP dapat diakses melalui www.blulpmukp.id.

3) Ketersediaan Database yang Terpusat

Dalam upaya peningkatan layanan sistem keuangan dan mengurangi duplikasi data dalam pencatatan keuangan organisasi, LPMUKP telah berupaya mereformasi secara bertahap sistem pencatatan keuangan internal yang saat ini telah diterapkan salah satunya dalam aplikasi Belanja Operasional yang berbasis web.

4) Ketersediaan Dashboard Intern dan Ekstern

Selanjutnya untuk menampilkan kinerja penyaluran dana bergulir, LPMUKP juga telah menyusun dashboard yang berisi informasi terkait dengan penyaluran dana bergulir yang dapat diakses melalui <https://distribusi.blulpmukp.id/wp/> yang memuat terkait dengan realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

5) Ketersediaan Webservis untuk Transfer Data ke Kementerian Keuangan

LPMUKP telah mengembangkan webservice untuk melakukan transfer data (saldo, penerimaan, pengeluaran) ke Kementerian Keuangan menggunakan sistem API (metode POST) yang telah disesuaikan berdasarkan pedoman dari PPK BLU. Pengirimandata dilakukan secara periodik (per bulan).

6) Ketersediaan SOP Terkait dengan Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi

Dalam upaya peningkatan efektivitas kinerja serta pendayagunaan sistem yang telah ada, maka LPMUKP telah melakukan penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) sebagai tolak ukur pemanfaatan teknologi informasi yang ada di lingkup internal organisasi.

7) Ketersediaan dan Implementasi Sistem Aplikasi untuk Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara Elektronik

Tata naskah dinas secara elektronik menggunakan aplikasi berbasis web untuk keperluan persuratan yang dikenal dengan istilah *Office Automation*.

8) Implementasi Inovasi di Bidang Teknologi Informasi untuk Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Keuangan

Untuk mempermudah layanan dan pengelolaan keuangan LPMUKP telah membuat aplikasi sebagai inovasi layanan dalam rangka mempermudah administrasi, aplikasi tersebut berupa aplikasi belanja operasional dan aplikasi akuntansi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas layanan dan pengelolaan keuangan.

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU pada Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 2%.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Modernisasi BLU

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	95%	95	100%	97%	97

Dalam rangka pemenuhan variabel-variabel yang diperlukan dalam mencapai target modernisasi BLU, LPMUKP terus melakukan berbagai pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan BLU yang modern agar mudah dalam pengelolaannya.

G. Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP

Dalam rangka mendukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkup LPMUKP, maka pada Tahun 2021 LPMUKP tetap menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana LPMUKP memiliki perjanjian kinerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Kinerja sebanyak 11 Indikator dengan 2 (dua) sasaran strategis.

Nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan dokumen SAKIP dengan menilai beberapa aspek yaitu aspek kepatuhan, aspek keseuaian, aspek ketercapaian serta aspek ketepatan. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun, target dari Indikator Kinerja ini adalah sebesar 91%.

Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP pada Tahun 2021 adalah **93,68%**, nilai tersebut diperoleh dari beberapa aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi kinerja dengan penilaian yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal KKP. Untuk lebih jelasnya skor aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Skor Aspek Penilaian Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESEUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per Aspek	100,00	100,00	94,70	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	23,68	20,00
Total Skor	93,68			

Total skor capaian yang diperoleh pada Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP adalah sebesar 93,68% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91%, maka capaian LPMUKP adalah sebesar **102,95%**.

$$\text{Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP} = \frac{93,68\%}{91\%} = 102,95\%$$

Kemudian, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020 capaian kinerja nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP pada Tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan dengan nilai sebesar **10,93%**. Perbandingan capaian kinerja nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP dapat dilihat pada **Tabel 3.19**.

Tabel 3.19 Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP	90%	84,45%	93,83	91%	93,68%	102,95

Faktor keberhasilan pencapaian nilai rekonsiliasi kinerja LPMUKP disebabkan oleh terpenuhinya aspek kepatuhan, aspek kesesuaian, aspek ketepatan dan nilai yang cukup baik untuk aspek ketercapaian. LPMUKP mengupayakan pemenuhan dokumen SAKIP agar sesuai dengan yang telah dipersyaratkan pada pelaksanaan rekonsiliasi kinerja. Sementara itu, untuk aspek ketercapaian yang masih belum dapat terpenuhi, LPMUKP akan terus mengusahakan agar dapat mencapai Indikator Kinerja yang telah disepakati dengan optimal.

H. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPMUKP

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Penilaian kinerja anggaran berdasarkan diukur dengan mengukur beberapa aspek yaitu:

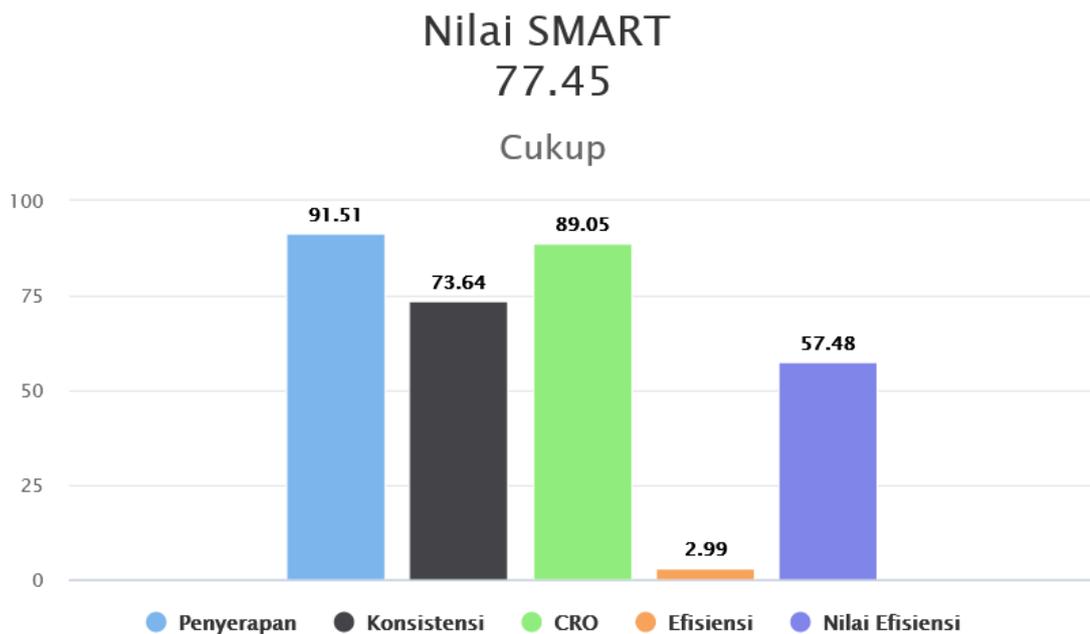
- **Aspek Implementasi** adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya;
- **Aspek Manfaat** adalah evaluasi kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program K/L;

- **Aspek Konteks** adalah evaluasi kinerja anggaran untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKAKL termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

Pada Tahun 2021 target Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP adalah sebesar **86**, dengan periode pelaporan Tahunan dan polarisasi Maximize, dimana semakin besar realisasi capaian maka semakin besar nilai kinerja anggaran yang diperoleh.

Realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPMUKP pada Tahun 2021 adalah sebesar **77,45** yang diperoleh dari aplikasi SMART dengan rincian yang dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Rincian Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan SMART DJA



Realisasi nilai SMART tersebut merupakan realisasi nilai kinerja anggaran LPMUKP, sehingga secara perhitungan, apabila realisas dibandingkan dengan target maka capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPMUKP adalah sebesar **90,06%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP} &= \frac{77,45}{86} \times 100\% \\ &= 90,06\% \end{aligned}$$

Capaian NKA pada Tahun 2021 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian NKA pada Tahun 2020. Penurunan yang dialami LPMUKP pada realisasi capaian NKA adalah sebesar -18,83% dengan rincian perbandingan capaian yang dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP	85	92,03	108,27	86	77,45	90,06

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran LPMUKP adalah penilaian terhadap penyerapan anggaran yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan output yang seharusnya dicapai. Hal tersebut berpengaruh pada penilaian efisiensi anggaran dimana seharusnya antara anggaran yang direalisasikan selaras dengan output yang dihasilkan.

Selanjutnya, dalam mencapai indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2022 maka LPMUKP akan menyusun rencana aksi terhadap penyerapan anggaran LPMUKP serta terus memonitoring capaian output yang diukur berdasarkan realisasi anggaran dan realisasi kinerja Tahun berjalan agar penilaian terhadap efisiensi mendapatkan nilai yang baik.

I. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Dalam penilaian IKU ini terdapat beberapa aspek penilaian diantaranya:

- a) Dokumen, bobot 20% (Renstra, Manual IKU, PK es 1 dan 2, Laporan Kinerja)
- b) Keikutsertaan, bobot 10% (persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi bitrix)
- c) Keaktifan, bobot 70% (Upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H).

Target Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup LPMUKP pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **84%**.

Tabel 3.21 Target Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
9.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup LPMUKP	84%

Kemudian berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Pusdatin selaku koordinator IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, pada periode Triwulan IV Tahun 2021 realisasi LPMUKP pada Indikator Kinerja ini mencapai **97,45%**, sehingga capaian realisasinya adalah sebesar **116,01%**.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Persentase MP} &= \frac{97,45\%}{84\%} \\ &= 116,01\% \end{aligned}$$

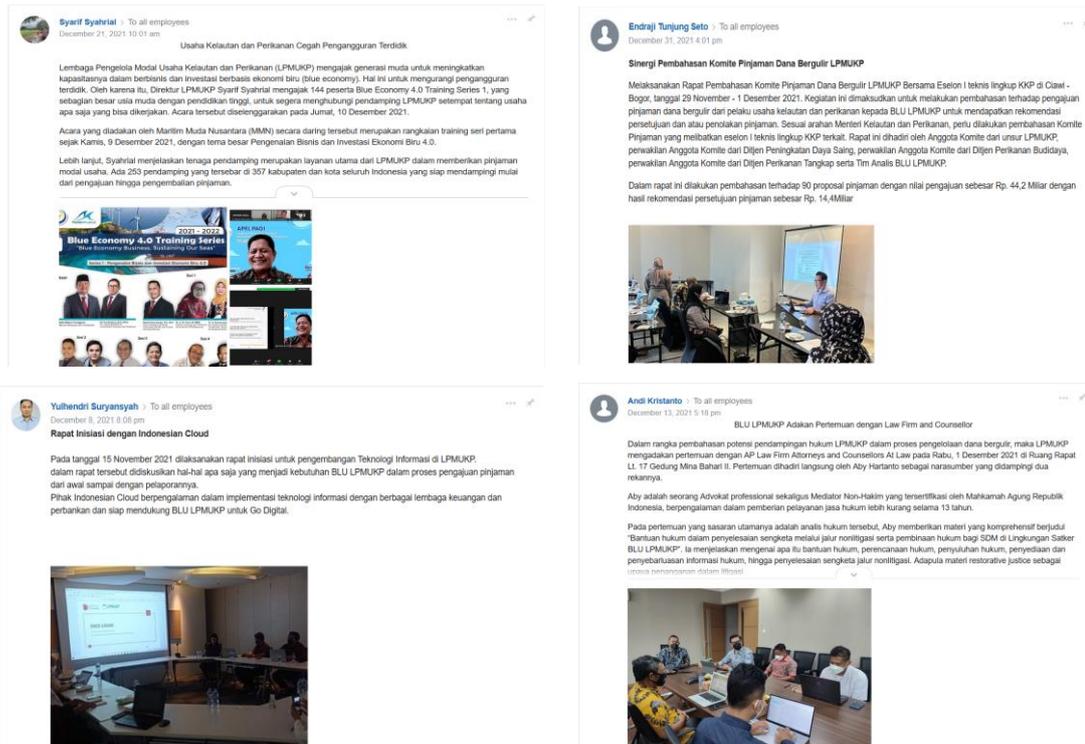
Selanjutnya jika dibandingkan dengan Tahun 2020, capaian IKU MP pada Tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan sebesar **1,98%**. Untuk lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dapat dilihat pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja MP

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkup LPMUKP	82	95,56	116,54	84	97,45	116,01

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar merupakan hasil dari ketersediaan dokumen yang diminta, jumlah keikutsertaan dalam aplikasi bitrix serta keaktifan para pejabat dan pelaksana LPMUKP yang berpartisipasi aktif dalam melakukan pengisian aplikasi bitrix.

Gambar 3.3 Tampilan Posting pada Aplikasi Bitrix LPMUKP



J. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2020 Lingkup BLU LPMUKP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam Perjanjian Kinerja antara LPMUKP dengan Sekretariat Jenderal KKP Tahun Anggaran 2021 salah satu Indikator Kinerja LPMUKP yang baru bagi LPMUKP adalah Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2020 Lingkup BLU LPMUKP dengan target capaian sebesar **100%**. Dengan adanya Indikator Kinerja ini maka LPMUKP harus berusaha untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK pada Tahun 2020.

Tabel 3.23 Target Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2020 Lingkup BLU LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
10.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2020 Lingkup BLU LPMUKP	100%

Berdasarkan hasil perhitungan persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Setjen yang tercantum dalam Memorandum Kepala Biro Keuangan kepada Kepala Biro Perencanaan Nomor 3444/SJ.2/TU.140/X/2021 perihal Capaian IKU Rekapitulasi Temuan Itjen dan BPK, realisasi penyelesaian temuan BPK di lingkup LPMUKP adalah **100%** sehingga capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar **100%**.

Tabel 3.24 Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat Jenderal

No.	Unit Eselon II	Nilai Temuan Kepatuhan	Tindak Lanjut	Sisa	Persentase Penyelesaian (%)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2	Biro SDMAO	-	-	-	100
3	Biro Hukum	-	-	-	100
4	Biro Humas dan KLN	-	-	-	100
5	Biro Keuangan	-	-	-	100
6	Biro Umum dan PBJ	551.996.250	551.996.250	0	100
7	Pusdatin	-	-	-	100
8	LPMUKP	176.347.700	176.347.700	0	100
Jumlah		228.343.950	228.343.950	0	100

Perbandingan capaian realisasi persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPMUKP cenderung sama, tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini disebabkan LPMUKP mampu untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK pada Tahun 2021 maupun Tahun 2020 sehingga capaiannya pun masih sama yaitu sebesar **100%**.

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
10.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup LPMUKP	100	100	100	100	100	100

Pada Tahun Anggaran selanjutnya LPMUKP akan terus mempertahankan kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK sebagai bentuk kepatuhan terhadap tindak lanjut temuan pada saat dilakukannya pemeriksaan.

K. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) baik bentuk surat maupun bab yang terbit pada Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan.

Target Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP dengan polarisasi maximize dimana semakin tinggi nilai persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi maka capaian tersebut semakin baik.

Tabel 3.26 Target Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
11.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP	65%

Berdasarkan memorandum dari Kepala Biro Keuangan Nomor 59/SJ.2/RC.610/I/2022 perihal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen, LPMUKP terdapat 11 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dan tuntas, sehingga tidak ada sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka realisasi Indikator Kinerja ini adalah **100%**, sehingga nilai capaian pada IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP adalah sebesar **154%**.

Tabel 3.27 Rekap Realisasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)
1	Biro Perencanaan	23	23	100,00
2	Biro Keuangan	10	10	100,00
3	Biro Umum dan PBJ	10	10	100,00
4	Biro Hukum	19	19	100,00
5	Biro SDMAO	20	20	100,00
6	Biro Humas dan KLN	0	0	100,00
7	Pusdatin	25	25	100,00
8	LPMUKP	11	11	100,00
Total		118	118	100,00

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020 yang sebesar 73%, maka capaian pada Tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan sebesar 37%. Untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
11.	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BLU LPMUKP	60	73	122	65	100	154

3.2. Kinerja Keuangan

3.2.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan LPMUKP pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.56.038.640.057,00 dari target pendapatan PNBPN sebesar Rp. 42.682.453.000,00 yang terdiri dari:

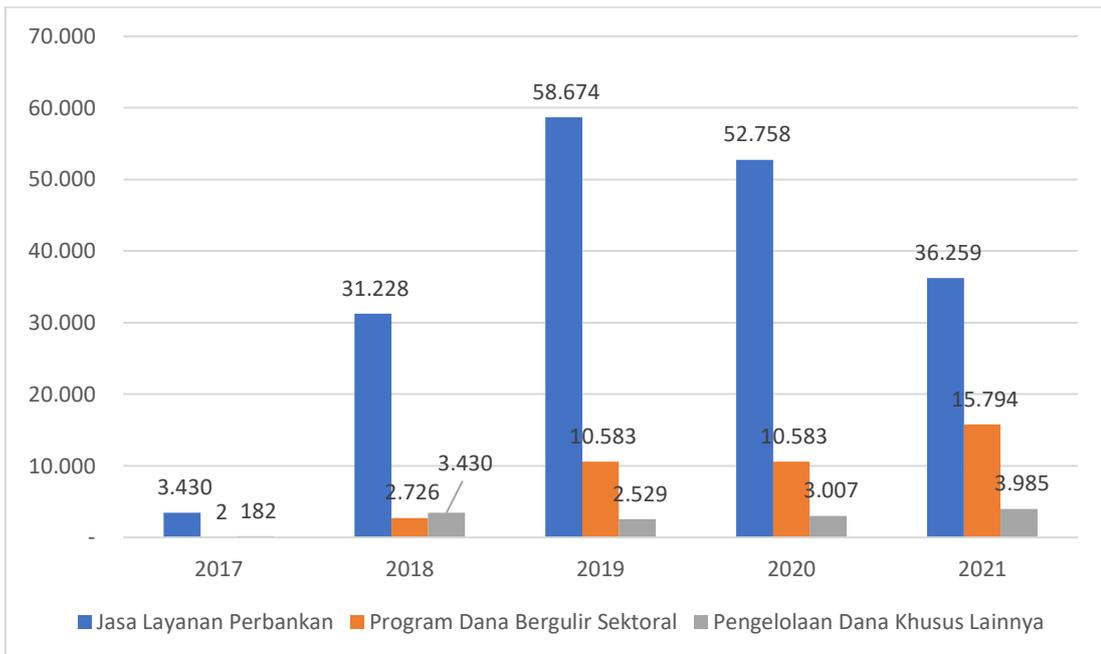
- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp.36.259113.632,00
- Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral sebesar Rp.15.794.433.050,00
- Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya sebesar Rp.3.985.093.375,00

Kondisi pandemi covid-19 mengakibatkan kinerja penyaluran dana bergulir LPMUKP tidak dapat berjalan secara optimal sehingga berdampak pada beberapa kinerja, termasuk kinerja PNBPN layanan BLU LPMUKP.

Realisasi jumlah PNBPN BLU masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan. Akan tetapi, realisasi pendapatan jasa layanan atas tarif dana bergulir yang diberlakukan juga mulai menunjukkan hasil yang baik, terbukti dengan hampir tercapainya target PNBPN layanan BLU sebesar Rp.19 Miliar dari target Rp.20 Miliar.

Kedepannya, LPMUKP akan terus mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan memperkecil proporsi pendapatan non jasa layanan atas penempatan dana kelolaan BLU. Perkembangan pendapatan PNBPN lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut:

Gambar 3.4 Perkembangan Pendapatan PNBP BLU



3.2.2. Belanja Operasional

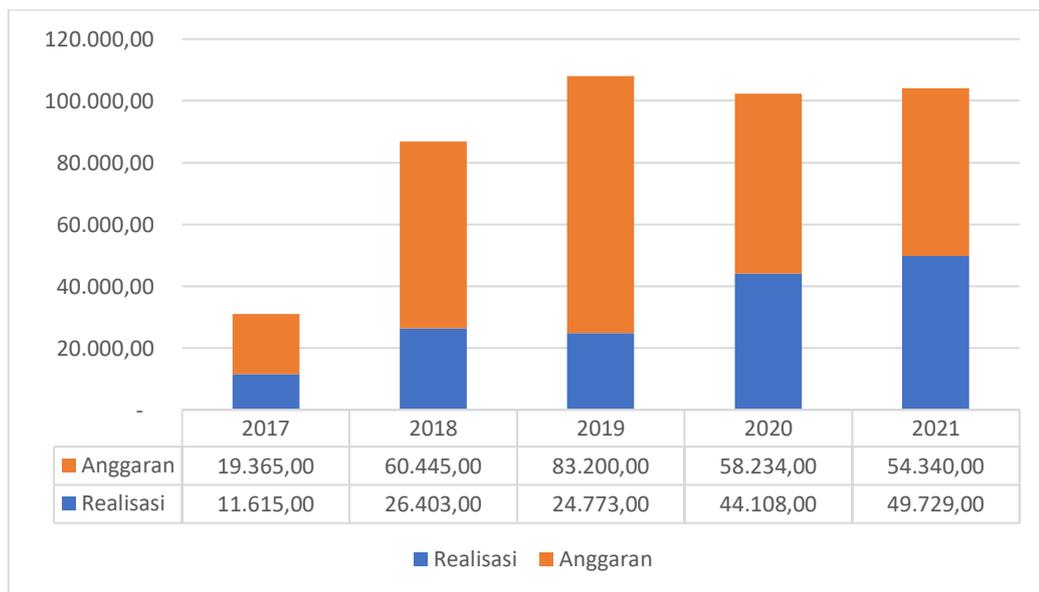
LPMUKP mendapatkan dana kelolaan pertamanya pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.500.000.000.000,00 dan merupakan tahun pertama bagi BLU LPMUKP dalam melaksanakan operasional penyaluran dana bergulir, pada saat itu LPMUKP hanya menggunakan anggaran belanja untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional dengan anggaran yang berse sumber dari Rupiah Murni Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.19,36 Miliar yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyaluran dana bergulir LPMUKP. Kemudian pada Tahun Anggaran 2018, LPMUKP memperoleh kembali dana kelolaan tambahan sebesar Rp.850.000.000.000,00 pada bulan Oktober, dengan begitu total jumlah dana kelolaan LPMUKP pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.350.000.000.000,00 dengan ditunjang oleh pagu anggaran belanja untuk mendukung kegiatan penyaluran dana bergulir sebesar Rp.60,44 Miliar yang terdiri atas penerimaan Rupiah Murni sebesar Rp.13,17 dan proyeksi penerimaan PNBP sebesar Rp.47,27 Miliar. Tahun anggaran 2019 LPMUKP menerima alokasi dana yang berasal dari APBN KKP Rp.11,60 Miliar dan Target Pendapatan atas penerimaan PNBP BLU sebesar Rp.71,59 Miliar sehingga total dana operasional LPMUKP pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.83,20 Miliar. Tahun Anggaran 2020, LPMUKP menerima alokasi dana berupa Rupiah Murni sebesar Rp. 12.666 Miliar dan Target Pendapatan PNBP BLU sebesar Rp.58,23 Miliar sehingga total pendapatan BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.70,9 Miliar. Pada bulan April 2020, terdapat

penghematan anggaran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dalam mendukung kebijakan tersebut seluruh anggaran Rupiah Murni LPMUKP sebesar Rp.12,66 Miliar digunakan untuk membantu percepatan penanggulangan pandemi *Covid-19*, sehingga total anggaran BLU LPMUKP pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.58,23 yang seluruhnya bersumber dari anggaran proyeksi penerimaan PNBPN BLU tahun berjalan.

Selanjutnya pada Tahun 2021, pagu anggaran BLU LPMUKP berdasarkan surat bersama adalah sebesar Rp.32.000.000.000,00 dari target proyeksi pendapatan LPMUKP sebesar Rp.42.682.453.000,00. Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat, LPMUKP menilai perlu adanya anggaran tambahan yang dapat mengakomodir dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir, yang pada akhirnya LPMUKP menggunakan saldo kas yang dimiliki sebesar Rp.22.340.501.000,00 guna mendukung kegiatan operasional layanan BLU LPMUKP. Perkembangan keuangan LPMUKP secara lengkap pada

Gambar 3.5.

Gambar 3.5. Perkembangan Anggaran dan Realisasi LPMUKP hingga Tahun 2021



Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 49,72 Miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp. 54,34 Miliar sehingga realisasi anggaran yang digunakan dari total alokasi adalah 91,51% persen.

3.2.3. Surplus/Defisit

LPMUKP pada Tahun Anggaran 2021 mengalami surplus sebesar Rp.28.649.977.291,00 dari pendapatan PNBPN BLU sebesar Rp.56.038.640.057,00

dengan total realisasi anggaran belanja sebesar Rp.49.729.163.766,00. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya (2020), dikarenakan pada Tahun 2020 realisasi anggaran belanja LPMUKP belum dapat dilakukan secara optimal akibat belum terpenuhinya SDM BLU LPMUKP. Surplus pendapatan LPMUKP pada Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi dikarenakan adanya penggunaan saldo kas BLU guna memenuhi anggaran belanja LPMUKP yang hanya sebesar Rp.32.000.000.000,00 yang kemudian direvisi melalui mekanisme penggunaan saldo kas BLU sebesar Rp.22.340.501.000,00 sehingga total anggaran LPMUKP adalah sebesar Rp.54.340.501.000,00.

3.2.4. Neraca LPMUKP Tahun 2021

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tahun 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.461.548.360.800 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 108.289.470.266; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 3.639.723.084; Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 730.690.427.778; dan Ekuitas sebesar Rp 111.548.360.800. Laporan Posisi Keuangan/Neraca LPMUKP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.29**.

Tabel 3.29. Posisi Keuangan/Neraca LPMUKP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021 (dalam Rp.000,-)	31 Desember 2020 (dalam Rp.000,-)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Kas Pada Badan Layanan Umum	108.289.470	79.080.567
Piutang Bukan Pajak	1.890.033	-
Penyisihan Piutang Tak Taretagih – Piutang Bukan Pajak	(213.714)	-
Piutang bukan pajak (Netto)	1.676.319	-
Persediaan	10.230	14.876
Jumlah Aset Lancar	109.976.019	101.507.791
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Dana Bergulir	621.179.375	458.088.556
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(3.937.185)	(6.172.647)
Jumlah Investasi Jangka Panjang	617.242.190	451.915.909
ASET TETAP		
Tanah	-	-
Peralatan dan mesin	5.517.307	4.863.651
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-

URAIAN	31 Desember 2021 (dalam Rp.000,-)	31 Desember 2020 (dalam Rp.000,-)
Aset Tetap Lainnya	1.598.740	95.000
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(3.476.324)	(2.469.917)
Jumlah Aset Tetap	3.639.723	2.488.733
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	2.929.846	2.555.756
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	728.820.624	891.911.443
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(1.060.042)	(758.111)
Jumlah Aset Lainnya	730.690.427	893.709.088
JUMLAH ASET	1.461.548.360	1.449.621.522
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	1.350.000.000	1.350.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1.350.000.000	1.350.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN	1.350.000.000	1.350.000.000
EKUITAS		
Ekuitas	111.548.360	99.621.522
JUMLAH EKUITAS	111.548.360	99.621.522
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.461.548.360	1.449.621.522

3.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLU LPMUKP Tahun 2021

3.3.1. Penyusunan Peraturan Direktur LPMUKP Tahun 2021

Dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir, LPMUKP menyusun beberapa regulasi sebagai bentuk pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bergulir pada Tahun 2021 guna mengatur kebijakan-kebijakan yang perlu diberlakukan, diantaranya:

Tabel 3.30 Daftar Peraturan Direktur LPMUKP Tahun 2021

No	Tahun	Nomor Peraturan Direktur	Perihal
1	2021	1/PER-LPMUKP/2021	Kepegawaian LPMUKP
2	2021	2/PER-LPMUKP/2020	Pelaksanaan Akad (Perjanjian) Pembiayaan Dana Bergulir di Provinsi Aceh
3	2021	3/PER-LPMUKP/2021	Pelaporan Piutang PNBPN Berbasis Akrua
4	2021	4/PER-LPMUKP/2021	Perubahan Atas PERDIR LPMUKP No. 13/PER-LPMUKP/2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Lingkup LPMUKP

3.3.2. Publikasi BLU LPMUKP Tahun 2021

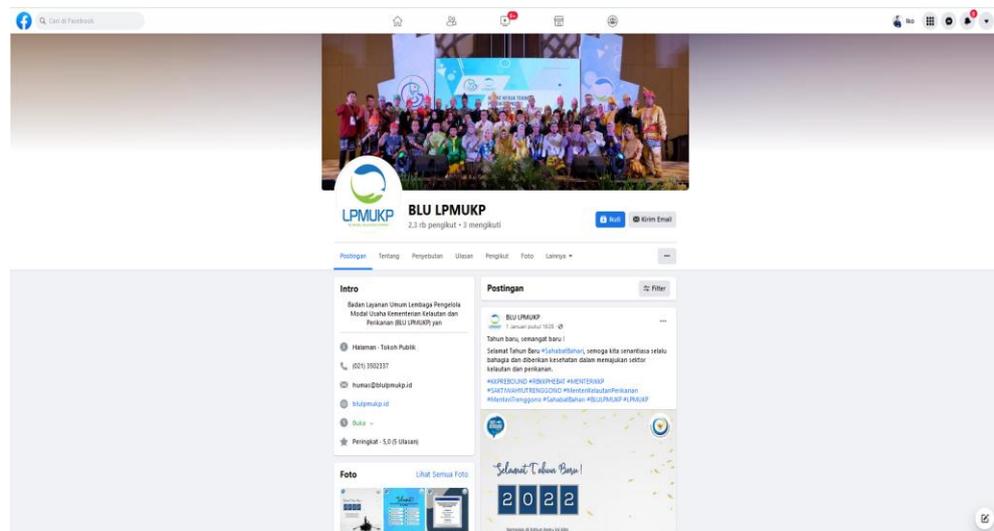
Sebagai salah satu upaya dalam memperkenalkan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang berfokus dengan kegiatan pembiayaan di Sektor Kelautan dan Perikanan dengan tarif layanan yang murah serta mudah diakses, maka LPMUKP terus melaksanakan kegiatan publikasi melalui sosial media serta pemanfaatan internet sebagai media penyebaran yang digandrungi

masyarakat di zaman sekarang. Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh BLU LPMUKP dalam rangka memperkenalkan Lembaga kepada masyarakat:

1) Pembuatan akun sosial media

Pembuatan akun-akun sosial media digunakan sebagai salah satu Langkah LPMUKP dalam memuat informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan serta sebagai salah satu Langkah modernisasi BLU dalam penyampaian informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, pembuatan media sosial juga ditujukan untuk mempromosikan layanan LPMUKP kepada publik agar dapat menumbuhkan keasadaran akan kehadiran LPMUKP sebagai salah satu lembaga yang memberikan solusi atas modal usaha khususnya di sektor Kelautan dan Perikanan. Media sosial yang digunakan diantaranya Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

Gambar 3.6. BLU LPMUKP dalam Sosial Media



BLU LPMUKP
1,430 Tweets

BLU LPMUKP
@blulpmukp

Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan.
[Translate bio](#)

Jakarta Pusat, DKI Jakarta [blulpmukp.id](#) Joined November 2017

17 Following 1,668 Followers

Followed by Jalu A. Pratomo

BLU LPMUKP @blulpmukp · Feb 22, 2021
Halo #sahabatbahari!
Ingin kenal BLU LPMUKP? Yuk simak profil kami!
[#kkp](#) [#kkpgoid](#) [#kkprebound](#) [#blulpmukp](#) [#lpmukp](#)

Instagram

blulpmukp Kirim pesan

441 kiriman 6,846 pengikut 56 diikuti

BLU LPMUKP
Badan Layanan Umum
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Twitter: @blulpmukp
Facebook: BLU LPMUKP
[blulpmukp.id](#)

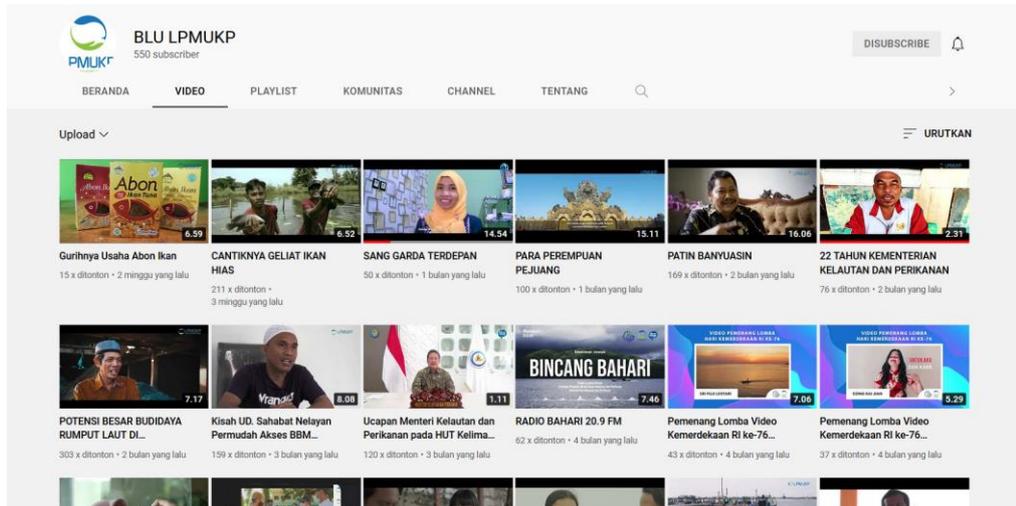
Diikuti oleh bendungdamarto, adhityaapn, viqlyh, + 47 lainnya

KEGIATAN FAQ REKRUTMEN KATA PAKAR

POSTINGAN REELS VIDEO DITANDAI

Selamat! Berikut daftar pemenang Kuis Sambung Kata BLU LPMUKP

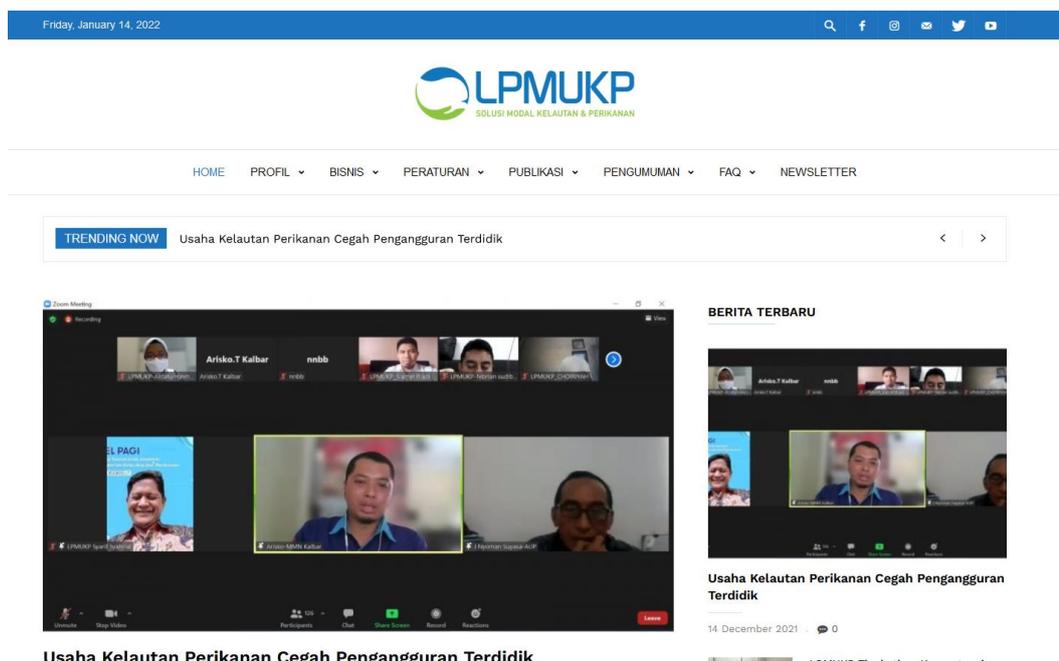
Abon

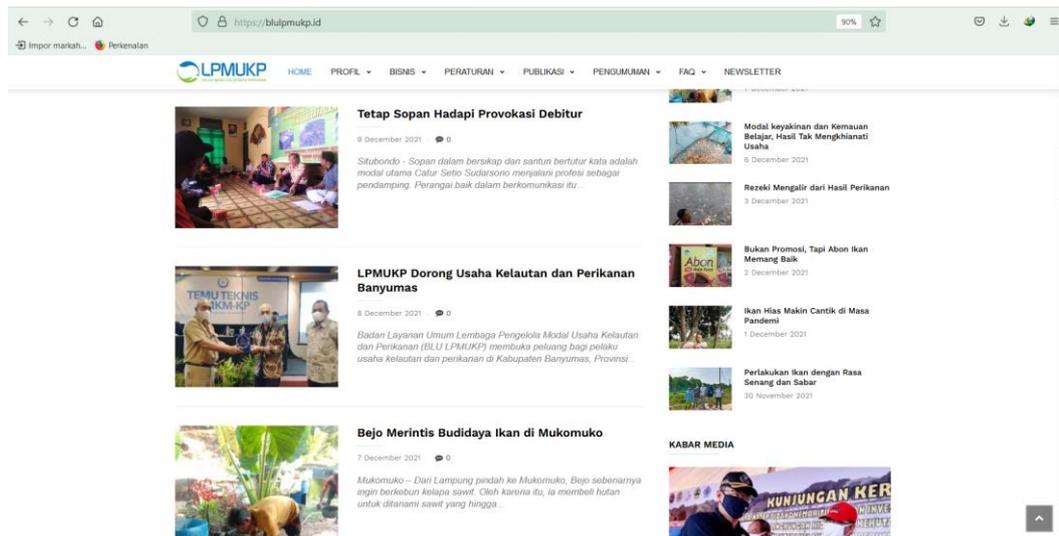


2) Website BLU LPMUKP

Pemanfaatan teknologi informasi dengan menyebarkan informasi terkait BLU melalui internet, selain pembuatan akun sosial media LPMUKP juga memiliki website yang berisikan informasi dan kegiatan aktual LPMUKP yang dapat diakses melalui <https://blulpmukp.id>.

Gambar 3.7. Tampilan Website LPMUKP





3) Pemberitaan BLU LPMUKP melalui media

Adapun pemberitaan terkait dengan BLU LPMUKP yang terus berinovasi dan mengembangkan inovasi layanan dalam menyalurkan modal usaha melalui kegiatan dana bergulir. Berikut merupakan pemberitaan terkait dengan BLU LPMUKP melalui media online:

Tabel 3.31 Pemberitaan BLU LPMUKP melalui Media Online

NO	TANGGAL	JUDUL ARTIKEL	TAUTAN
1	11 April 2021	Cegah Kepunahan Habitat Asli, KKP Beri Bantuan Modal Budi Daya	https://www.jawapos.com/nasional/11/04/2021/cegah-kepunahan-habitat-asli-kkp-beri
2	23 April 2021	Pacu Nelayan Belitung, BLU KKP Salurkan Bantuan Permodalan Rp 290 Juta	https://www.jawapos.com/ekonomi/23/04/2021/pacu-nelayan-belitung-blu-kkp-salurkan-bantuan-permodalan-rp-290-juta/
3	24 April 2021	Kembangkan Potensi Natuna, KKP Salurkan Modal ke Nelayan	https://www.jawapos.com/ekonomi/24/04/2021/kembangkan-potensi-natuna-kkp-salurkan-modal-ke-nelayan/
4	24 April 2021	Menteri KKP Soroti Pentingnya Peran Pendamping Modal Usaha Nelayan	https://www.jawapos.com/ekonomi/24/04/2021/menteri-kkp-soroti-pentingnya-peran-pendamping-modal-usaha-nelayan/
5	25 April 2021	Sejak 2017, BLU LPMUKP Telah Salurkan Rp 699 M Dana Bergulir	https://www.jawapos.com/nasional/25/04/2021/sejak-2017-blu-lpmukp-telah-salurkan-rp-699-m-dana-bergulir/
6	27 April 2021	Alih Profesi Demi Bantu Pelaku Usaha Perikanan di Pesisir Selatan	https://www.jawapos.com/ekonomi/27/04/2021/alih-profesi-demi-bantu-pelaku-usaha-perikanan-di-pesisir-selatan/
7	29 April 2021	Budidaya Ikan, Hobi Yang Jadi Jalan Hidup	https://www.jawapos.com/ekonomi/29/04/2021/budidaya-ikan-hobi-yang-jadi-jalan-hidup/
8	29 April 2021	LPMUKP Dampingi Debitur Bertahan di Masa Pandemi	https://www.jawapos.com/ekonomi/29/04/2021/lpmukp-dampingi-debitur-bertahan-di-masa-pandemi/
9	29 April 2021	Menteri KKP Beri Modal Rp 1,65 M ke Pelaku Usaha Perikanan di Jepara	https://www.jawapos.com/ekonomi/29/04/2021/menteri-kkp-beri-modal-rp-165-m-ke-pelaku-usaha-perikanan-di-jepara/
10	3 Mei 2021	Menteri Trenggono Ingatkan Debitur Disiplin Bayar Cicilan	https://www.jawapos.com/ekonomi/03/05/2021/menteri-trenggono-ingatkan-debitur-disiplin-bayar-cicilan/
11	5 Mei 2021	Inovasi Debitur LPMUKP Probolinggo Dipakai Pengolah Garam Daerah Lain	https://www.jawapos.com/ekonomi/05/05/2021/inovasi-debitur-lpmukp-probolinggo-dipakai-pengolah-garam-daerah-lain/
12	19 Mei 2021	Apresiasi Kinerja Pendamping, Sekjen KKP: Kalian Luar Biasa	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/05/2021/apresiasi-kinerja-pendamping-sekjen-kkp-kalian-luar-biasa/
13	28 Mei 2021	Apik Kelola Modal, Nelayan Ini Sukses di Rantau	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/05/2021/apik-kelola-modal-nelayan-ini-sukses-di-rantau/
14	28 Mei 2021	Ikan Olahan Debitur LPMUKP Laris Manis di Pasar Online	https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/28/05/2021/ikan-olahan-debitur-lpmukp-laris-manis-di-pasar-online/
15	28 Mei 2021	Sang Pendamping LPMUKP, Riswan Mengedukasi Nelayan dari Pulau ke Pulau	https://www.jawapos.com/jpg-today/28/05/2021/sang-pendamping-lpmukp-riswan-mengedukasi-nelayan-dari-pulau-ke-pulau/

16	30 Mei 2021	Poklhasar Mina Kerti Danai Kolam Milik Pembudi Daya	https://www.jawapos.com/nasional/30/05/2021/poklhasar-mina-kerti-danai-kolam-milik-pembudi-daya/
17	31 Mei 2021	Media Sosial, Solusi Pendampingan di Kepulauan Selayar	https://www.jawapos.com/ekonomi/31/05/2021/media-sosial-solusi-pendampingan-di-kepulauan-selayar/
18	31 Mei 2021	Januari-April 2021, LPMUKP Realisasikan 33 Persen Target Penyaluran	https://www.jawapos.com/ekonomi/31/05/2021/januari-april-2021-lpmukp-realisasikan-33-persen-target-penyaluran/
19	3 Juni 2021	Menteri Trenggono Dorong Permodalan LPMUKP Bisa Bergulir	https://www.jawapos.com/ekonomi/03/06/2021/menteri-trenggono-dorong-permodalan-lpmukp-bisa-bergulir/
20	4 Juni 2021	Menteri Trenggono Pastikan Dana Bergulir LPMUKP Tepat Guna	https://www.jawapos.com/ekonomi/04/06/2021/menteri-trenggono-pastikan-dana-bergulir-lpmukp-tepat-guna/
21	12 Juni 2021	LPMUKP Perluas Layanan Gaet Pelaku Usaha KP Cilegon	https://www.jawapos.com/ekonomi/12/06/2021/lpmukp-perluas-layanan-gaet-pelaku-usaha-kp-cilegon/
22	19 Juni 2021	Pendamping LPMUKP di Riau Tarik Minat Pelaku Usaha Mikro	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/06/2021/pendamping-lpmukp-di-riau-tarik-minat-pelaku-usaha-mikro/
23	19 Juni 2021	KKP: Kemandirian Pakan Tingkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan Mikro	https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/19/06/2021/kkp-kemandirian-pakan-tingkatkan-kesejahteraan-pembudidaya-ikan-mikro/
24	22 Juni 2021	Tak Hanya Beri Pinjaman, LPMUKP Hadir Dampingi Pelaku Usaha Sektor KP	https://www.jawapos.com/ekonomi/22/06/2021/tak-hanya-beri-pinjaman-lpmukp-hadir-dampingi-pelaku-usaha-sektor-kp/
25	26 Juni 2021	Nelayan Ikan Tuna Sangat Terbantu dengan Pinjaman Modal BLU-LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/26/06/2021/nelayan-ikan-tuna-sangat-terbantu-dengan-pinjaman-modal-blu-lpmukp/
26	29 Juni 2021	Peluang Menarik Pinjaman Modal di Tengah Pandemi Tak Boleh Dilewatkan	https://www.jawapos.com/ekonomi/29/06/2021/peluang-menarik-pinjaman-modal-di-tengah-pandemi-tak-boleh-dilewatkan/
27	30 Juni 2021	Potensi Menjanjikan Usaha Pengolahan Ikan di Wilayah Perbatasan	https://www.jawapos.com/ekonomi/30/06/2021/potensi-menjanjikan-usaha-pengolahan-ikan-di-wilayah-perbatasan/
28	13 Juli 2021	Dua Kunci Sukses Yayan Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan	https://www.jawapos.com/ekonomi/13/07/2021/dua-kunci-sukses-yayan-melakukan-pendampingan-pelaku-usaha-perikanan/
29	13 Juli 2021	Pola Konsumsi Berubah, Pembudi Daya Harus Kreatif	https://www.jawapos.com/ekonomi/13/07/2021/pola-konsumsi-berubah-pembudidaya-harus-kreatif/
30	14 Juli 2021	Hoaks Hingga Leadership Adalah Tantangan Humas BLU	https://www.jawapos.com/nasional/14/07/2021/hoaks-hingga-leadership-adalah-tantangan-humas-blu/
31	15 Juli 2021	Harapan Debitur Semangat bagi Pendamping	https://www.jawapos.com/ekonomi/15/07/2021/harapan-debitur-semangat-bagi-pendamping/
32	16 Juli 2021	Pandemi, Mbah Mul Malah Tambah Kolam Lele	https://www.jawapos.com/ekonomi/16/07/2021/pandemi-mbah-mul-malah-tambah-kolam-lele/
33	22 Juli 2021	Isi Masa Pensiun Bersama LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/22/07/2021/isi-masa-pensiun-bersama-lpmukp/
34	23 Juli 2021	Usaha Sampingan Berubah jadi Penghasilan Utama	https://www.jawapos.com/ekonomi/23/07/2021/usaha-sampingan-berubah-jadi-penghasilan-utama/
35	24 Juli 2021	Kemudahan Permodalan Kunci Usaha Budidaya	https://www.jawapos.com/ekonomi/24/07/2021/kemudahan-permodalan-kunci-usaha-budidaya/
36	27 Juli 2021	Berdayakan Warga Bersama Hadapi Pandemi	https://www.jawapos.com/ekonomi/27/07/2021/berdayakan-warga-bersama-hadapi-pandemi/
37	2 Agustus 2021	Pembenihan Gurami Menjelma Usaha Terintegrasi	https://www.jawapos.com/ekonomi/02/08/2021/pembe
38	4 Agustus 2021	Dengan Semangat Nasionalisme Galakkan Gerakan Makan Ikan	https://www.jawapos.com/ekonomi/04/08/2021/denga
39	6 Agustus 2021	Ramah Lingkungan Syarat Mutlak Peroleh Pendanaan LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/06/08/2021/ramah
40	20 Agustus 2021	Permodalan KKP Sukseskan Budidaya Lele di Gunungkidul	https://www.jawapos.com/ekonomi/20/08/2021/permo
41	21 Agustus 2021	LPMUKP Dampingi Wirausahawan Muda Bertahan di Masa Pandemi	https://www.jawapos.com/ekonomi/21/08/2021/lpmuk
42	23 Agustus 2021	Kepercayaan Kunci Sukses Debitur LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/23/08/2021/keperc
43	25 Agustus 2021	Sarjana Politik banting Stir Kelola Restoran Unik dan Budidaya Lele	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/08/2021/sarjan
44	31 Agustus 2021	Untung Hampir 100 Persen Pada Panen Perdana	https://www.jawapos.com/ekonomi/31/08/2021/untun
45	31 Agustus 2021	Permodalan LPMUKP Sentuh Nelayan Buton Utara	https://www.jawapos.com/ekonomi/31/08/2021/permo

46	13 September 2021	Direktur LPMUKP Sarankan Pokdakan UMB Jadi Koperasi	https://www.jawapos.com/ekonomi/13/09/2021/direk
47	15 September 2021	Pokdakan UMB ubah Limbah Menjadi Pupuk Sawit	https://www.jawapos.com/ekonomi/15/09/2021/pokd
48	22 September 2021	5 Tahun LPMUKP Semangat Membangun Indonesia	https://www.jawapos.com/nasional/22/09/2021/5-tahun-lpmukp-semangat-membangun-indonesia/
49	23 September 2021	Pembududaya Ikan di Grobogan Peroleh Permodalan LPMUKP	https://www.jawapos.com/ekonomi/23/09/2021/pemb
50	28 September 2021	Pengabdian Masyarakat Wujud Cinta Puji Pada Tanah Air	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/09/2021/peng
51	28 September 2021	Pinjaman Modal Dorong Kub Doa Sibuah Hati Tambah Pekerja	https://www.jawapos.com/ekonomi/28/09/2021/pinja
52	08 October 2021	Nelayan Tuna Bitung Dapat Modal Atasi Dampak Pandemi	https://www.jawapos.com/ekonomi/08/10/2021/nelay
53	26 October 2021	Karakter Bagus Angsuran Lancar Pelaku Usaha Tak Terjebak Tengkulak	https://www.jawapos.com/nasional/26/10/2021/karak
54	27 October 2021	Dampingi Nasabah Hingga Wilayah 3T	https://www.jawapos.com/ekonomi/27/10/2021/damp
55	29 October 2021	Mitra Kuat Pokdakan Sehat	https://www.jawapos.com/ekonomi/29/10/2021/mitra
56	30 October 2021	Nikmat Patin dari Kersnya Alam Sumatera Selatan	https://www.jawapos.com/ekonomi/30/10/2021/nikm
57	03 November 2021	Sepenggal Kisah Teri Super dari Buton Tengah	https://www.jawapos.com/ekonomi/03/11/2021/sepenggal-kisah-teri-super-dari-buton-tengah/
58	04 November 2021	Potensi Perikanan Banyuasin Butuh Stimulus	https://www.jawapos.com/ekonomi/04/11/2021/potensi-perikanan-banyuasin-butuh-stimulus/
59	05 November 2021	Berbisnis Rumput Laut Sembari Menjaga Ekosistem	https://www.jawapos.com/ekonomi/05/11/2021/berbisnis-rumput-laut-sembari-menjaga-ekosistem/
60	06 November 2021	Ekspor Ikan Lele ke Kanada dan Korea, Kenapa Tidak?	https://www.jawapos.com/ekonomi/06/11/2021/ekspor-ikan-lele-ke-kanada-dan-korea-kenapa-tidak/
61	08 November 2021	Koperasi Mina Banyuasin Kembangkan Kemitraan Plasma	https://www.jawapos.com/ekonomi/08/11/2021/koperasi-mina-banyuasin-kembangkan-kemitraan-plasma/
62	09 November 2021	Tampil Menawan dengan Garam Kosmetik	https://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2021/tampil-menawan-dengan-garam-kosmetik/
63	09 November 2021	Misi Imanuel: Semua Anak Bisa Kuliah	https://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2021/misi-imanuel-semua-anak-alor-bisa-kuliah/
64	10 November 2021	Mereka Mau Bayar Mahal Karena Memang Suka Ikan	https://www.jawapos.com/ekonomi/10/11/2021/mereka-mau-bayar-mahal-karena-memang-suka-ikan/
65	10 November 2021	Nelayan Butuh Dari Sekedar Telaten	https://www.jawapos.com/ekonomi/10/11/2021/nelayan-butuh-lebih-dari-sekadar-telaten/
66	11 November 2021	Berkat Ikan Anak Jadi Dosen	https://www.jawapos.com/ekonomi/11/11/2021/berkat-ikan-anak-jadi-dosen/
67	12 November 2021	Andrie Ingin Bangun Sentra Ikan Kayu Bitung	https://www.jawapos.com/ekonomi/12/11/2021/andrie-ingin-bangun-sentra-ikan-kayu-bitung/
68	17 November 2021	Dari Pokdakan Menuju Minapolitan	https://www.jawapos.com/ekonomi/17/11/2021/dari-pokdakan-menuju-minapolitan/
69	19 November 2021	BLU LPMUKP Bangkitkan UMKM Pulihkan Ekonomi Nasional	https://www.jawapos.com/ekonomi/19/11/2021/blu-lpmukp-bangkitkan-umkm-pulihkan-ekonomi-nasional/
70	23 November 2021	Punya Talenta dari Tuhan Harus Berguba, Nggak Leha-leha	https://www.jawapos.com/nasional/23/11/2021/punya-talenta-dari-tuhan-harus-berguna-nggak-leha-leha/

71	25 November 2021	Dari Montir Jadi Juragan Rebon dan Ikan Bilis Belah	https://www.jawapos.com/nasional/25/11/2021/dari-montir-jadi-juragan-rebon-dan-ikan-bilis-belah/
72	30 November 2021	Rajin Beri Makan Ikan, Peroleh Kehidupan	https://www.jawapos.com/ekonomi/30/11/2021/rajin-beri-makan-ikan-peroleh-kehidupan/
73	30 November 2021	Perlakukan Ikan dengan Rasa Senang dan Sabar	https://www.jawapos.com/nasional/30/11/2021/perlakukan-ikan-dengan-rasa-senang-dan-sabar/
74	01 Desember 2021	Ikan Hias Makin Cantik di Masa Pandemi	https://www.jawapos.com/ekonomi/01/12/2021/ikan-hias-makin-cantik-di-masa-pandemi/
75	02 Desember 2021	Bukan Promosi, Tapi Abon Ikan Memang Baik	https://www.jawapos.com/ekonomi/02/12/2021/bukan-promosi-tapi-abon-ikan-memang-baik/
76	03 Desember 2021	Rezeki Mengalir dari Hasil Perikanan	https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2021/rezeki-mengalir-dari-hasil-budidaya-ikan/
77	06 Desember 2021	Modal keyakinan dan Kemauan Belajar, Hasil Tak Mengkhianati Usaha	https://www.jawapos.com/nasional/06/12/2021/modal-keyakinan-dan-kemauan-belajar-hasil-tak-mengkhianati-usaha/
78	08 Desember 2021	Bejo Merintis Budidaya Ikan di Mukomuko	https://www.jawapos.com/ekonomi/08/12/2021/bejo-merintis-budidaya-ikan-di-mukomuko/
79	08 Desember 2021	LPMUKP Dorong Usaha Kelautan dan Perikanan Banyumas	https://www.jawapos.com/nasional/08/12/2021/lpmukp-dorong-usaha-kelautan-dan-perikanan-banyumas/
80	09 Desember 2021	LPMUKP Tingkatkan Kompetensi Staf Menilai Agunan	https://www.jawapos.com/ekonomi/09/12/2021/lpmukp-tingkatkan-kompetensi-staf-menilai-agunan/

3.3.3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran BLU LPMUKP Tahun 2021

1) Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal usaha KP

Pada Tahun 2021 LPMUKP telah menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran, kegiatan tersebut meliputi kegiatan operasional dan non operasional yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir pada Tahun Anggaran 2021.

Pengelolaan Modal Usaha KP merupakan kegiatan utama BLU LPMUKP yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang seluruhnya bersumber dari PNB BLU. Adapun Klasifikasi Rincian Output yang digunakan pada kegiatan pengelolaan modal usaha KP adalah Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (6453.BDG), Pengawasan dan Pengendalian Layanan (6453.BIF), Layanan Umum (6453.EAC), Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (6453.FAE). Realisasi kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2021 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.32**.

Tabel 3.32 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha KP per 31 Desember 2021

Kode	Program/Aktivitas/ KRO/ RO/ Komponen/ Subkomp/ Detil	Jumlah Biaya	Realisasi	%
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	54.340.501.000	49.729.163.766	91,51
6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	54.340.501.000	49.729.163.766	91,51
6453.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	5.956.160.000	4.854.104.600	81,50
6453.BDG.001	UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	5.956.160.000	4.854.104.600	81,50
051	Dukungan Operasional Penyaluran Modal Usaha KP	5.266.340.000	4.235.155.500	80,42
052	Layanan Pengelolaan Kemitraan dan Pendampingan LPMUKP	689.820.000	618.949.100	89,73
6453.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	813.630.000	765.884.900	94,13
6452.BIF.001	Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	813.630.000	765.884.900	94,13
051	Layanan Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Modal Usaha	813.630.000	765.884.900	94,13
6453.EAC	Layanan Umum	45.285.918.000	42.092.677.466	92,95
6453.EAC.001	Layanan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perencanaan	45.285.918.000	42.092.677.466	92,95
051	Dukungan Tata Usaha, Kepegawaian, Hukum dan Humas	45.091.314.000	41.945.705.266	93,02
052	Dukungan Perencanaan Strategis Bisnis dan Anggaran	194.604.000	146.972.200	75,52
6453.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2.284.793.000	2.016.546.800	88,26
6453.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.737.070.000	1.520.890.100	87,55
051	Layanan Operasional dan pengelolaan Keuangan BLU	1.737.070.000	1.520.890.100	87,55
6453.FAE.002	Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Usaha KP	326.100.000	295.948.500	90,75
051	Layanan Pengawasan dan Pemeriksaan Intern	326.100.000	295.948.500	90,75
6453.FAE.003	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	221.623.000	199.708.200	90,11
051	Layanan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	221.623.000	199.708.200	90,11

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program pengelolaan dana bergulir Tahun Anggaran 2021, LPMUKP terus berupaya memberikan inovasi terhadap program penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun Anggaran 2021, LPMUKP telah menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat dengan total penyaluran dana bergulir sebesar Rp.270.553.725.000,00 dengan total jumlah pemanfaat sebesar 6.888 Orang dengan akumulasi total penyaluran dari November 2017 hingga 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.872.616.798.490,00.

Perolehan PNBPN BLU secara umum telah melampaui target yang ditentukan, realisasi PNBPN BLU Tahun 2021 mencapai Rp.56.038.640.057,00 yang terdiri atas pendapatan jasa layanan sebesar Rp.19.779.526.425,00 dan pendapatan non jasa layanan sebesar Rp.36.259.113.632,00.

Selanjutnya, LPMUKP masih mampu mempertahankan angka rasio dana bergulir diragukan tertagih dan menekan rasio tersebut hingga 2,87%. Realisasi tersebut didukung dengan pelaksanaan mitigasi risiko LPMUKP yang terus dioptimalkan semenjak proses pengajuan proposal dan terus berlangsung hingga debitur LPMUKP dapat melunasi pinjaman yang diperoleh. Mitigasi risiko dalam pelaksanaan proses bisnis program penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sektor kelautan dan perikanan tentunya menjadi hal yang sangat penting mengingat sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang dipandang memiliki risiko yang cukup tinggi.

Untuk mendukung pengelolaan BLU yang modern, LPMUKP memiliki Indikator Kinerja persentase penyelesaian modernisasi BLU dimana pada Tahun 2021 LPMUKP telah memenuhi variabel-variabel yang menjadi penilaian modernisasi BLU meskipun belum dapat tercapai dengan maksimal, namun LPMUKP telah mengupayakan optimalisasi dalam penyelesaian modernisasi BLU. Hal ini ditunjukkan dengan adanya website yang representatif, pengelolaan aplikasi BIOS G2, ketersediaan dashboard, ketersediaan webservis, ketersediaan database, ketersediaan SOP, ketersediaan pengelolaan tata naskah dinas serta ketersediaan aplikasi pengelola keuangan yang memudahkan kinerja LPMUKP.

Secara capaian kinerja Tahun 2021, realisasi kinerja LPMUKP berdasarkan aplikasi kinerja adalah sebesar **92,39%** dan termasuk dalam kategori cukup baik. Indikator Kinerja yang capaiannya belum optimal adalah Nilai Kinerja Anggaran, hal ini disebabkan oleh penilaian efisiensi anggaran pada aplikasi SMART Kemenkeu yang menurun seiring dengan tingginya penyerapan anggaran LPMUKP. Kedepannya LPMUKP akan terus mengupayakan

pencapaian target kinerja secara optimal dengan didukung pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang relevan serta pembenahan di berbagai sisi seperti pembenahan pada Infrastruktur IT, pembenahan terhadap kompetensi SDM LPMUKP, pembenahan pada Standar Operasional Prosedur yang dirasa perlu untuk diperbaiki.

2. Saran

Guna meningkatkan kinerja pada Tahun Anggaran selanjutnya, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan LPMUKP guna meningkatkan capaian kinerja dan meningkatkan layanan pada program pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. LPMUKP terus menyalurkan dana bergulir dan melaksanakan optimalisasi pada pelaksanaan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat melalui upaya peningkatan inovasi layanan seperti pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih masif;
2. LPMUKP harus tetap melakukan optimalisasi pendapatan guna memenuhi kebutuhan operasional LPMUKP;
3. LPMUKP harus menjaga kualitas piutang bermasalah melalui pelaksanaan mitigasi risiko dimulai dari proses penerimaan proposal, pelaksanaan verifikasi kelayakan usulan pinjaman, pelaksanaan pembahasan komite pinjaman, dan penanganan pinjaman/piutang bermasalah sehingga dapat terus menekan angka rasio dana bergulir diragukan tertagih;
4. LPMUKP harus melaksanakan sosialisasi dan promosi yang lebih masif kepada masyarakat yang merupakan calon debitur maupun telah menjadi debitur LPMUKP agar lebih banyak yang memahami terkait dengan prosedur pinjaman dana bergulir dari proses pengajuan hingga pencairan;
5. Perlu adanya suatu peningkatan kualitas dan kompetensi terhadap SDM LPMUKP agar terus dapat memberikan inovasi dan layanan prima terhadap program penyaluran dana bergulir LPMUKP;
6. LPMUKP agar terus menjaga dan meningkatkan capaian target kinerja yang telah ditentukan guna mendorong LPMUKP menjadi lembaga yang lebih baik.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syarif Syahril**

Jabatan : Direktur LPMUKP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 September 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal


Antam Novambar

Pihak Pertama
Direktur LPMUKP


Syarif Syahril

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	1	Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum (Rp.)	42 Miliar
		2	Realisasi Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP (Pemanfaat)	13.100
		3	Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun Berjalan (Rp.)	600 Miliar
		4	Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih (%)	< 5
2	Tatakelola Pemerintah yang baik lingkup BLU LPMUKP	5	Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP (%)	90
		6	Modernisasi BLU (%)	100
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPMUKP (Nilai)	91
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLU LPMUKP	86
		9	Persentase Unit Kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup BLU LPMUKP (%)	84
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2020 lingkup BLU LPMUKP (%)	100
		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP (%)	65

Kegiatan : **Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan**

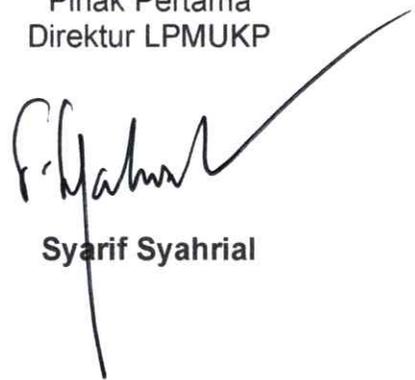
Jumlah Anggaran : **Rp.54.340.501.000,-**

Jakarta, 01 September 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal


Antam Novambar

Pihak Pertama
Direktur LPMUKP


Syarif Syahril

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

M E M O R A N D U M

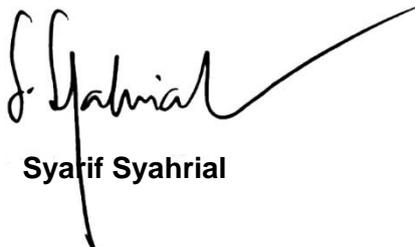
Nomor : 0011/LPMUKP/I/2022

Yth : Kepala Biro Perencanaan KKP
Dari : Direktur LPMUKP
Hal : Penyampaian Hasil Capaian Persentase PNBPN BLU LPMUKP Triwulan IV
Tahun 2021
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 10 Januari 2022

Sehubungan telah dilakukannya pengukuran IKU Persentase PNBPN BLU periode Triwulan IV Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target Persentase PNBPN BLU Tahun Anggaran 2021 adalah 97% dari target proyeksi penerimaan PNBPN sebesar Rp. 42 Miliar. Pada Triwulan IV Tahun 2021, target persentase PNBPN BLU adalah sebesar 97%;
2. Hingga 31 Desember 2021, realisasi penerimaan PNBPN BLU mencapai Rp.56.038.640.057,00- yang terdiri atas pendapatan jasa layanan sebesar Rp.19.779.526.425,00- dan pendapatan non jasa layanan sebesar Rp.36.259.113.632,00. Persentase capaian penerimaan PNBPN terhadap arget tahunan adalah sebesar 131,29% dan sebesar 135,35% terhadap target Triwulan IV;
3. Terlampir kami sampaikan rincian penerimaan PNBPN BLU hingga 31 Desember 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.


Syarif Syahril

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KKP
2. Kepala Biro Keuangan

Lampiran

Tabel 1. Rincian Realisasi PNBP BLU per 31 Desember 2021

Bulan	424911	424134	424139	PNBP
	pendapatan jasa layanan perbankan BLU	pendapatan program dana bergulir sektoral	pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya	
Januari	14.209.512.343	1.205.840.288	296.040.000	15.711.392.631
Februari	1.606.343.371	1.308.621.310	648.600.000	3.563.564.681
Maret	1.510.490.958	1.405.845.003	358.110.000	3.274.445.961
April	1.575.721.581	498.859.253	199.660.000	2.274.240.834
Mei	732.288.135	1.051.181.475	163.320.000	1.946.789.610
Juni	2.577.012.317	1.409.717.672	297.232.500	4.283.962.489
Juli	2.513.784.875	1.635.866.116	150.585.000	4.300.235.991
Agustus	2.203.044.167	1.008.746.062	527.172.500	3.738.962.729
September	2.484.906.063	1.262.480.072	283.438.375	4.030.824.510
Oktober	2.071.270.491	1.176.684.119	245.010.000	3.492.964.610
November	1.735.561.990	1.484.612.310	234.750.000	3.454.924.300
Desember	3.039.177.341	2.345.979.370	581.175.000	5.966.331.711
Total	36.259.113.632	15.794.433.050	3.985.093.375	56.038.640.057

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

M E M O R A N D U M

Nomor : 10/LPMUKP/I/2022

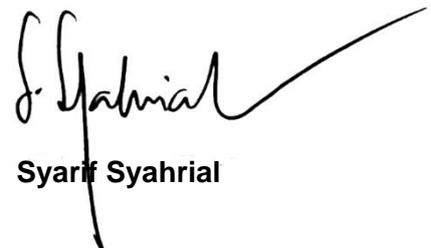
Yth : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Direktur LPMUKP
Hal : Penyampaian Hasil Capaian Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP per 31 Desember 2021
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 10 Januari 2022

Sehubungan telah dilakukannya pengukuran IKU Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP periode Triwulan IV Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Tahun Anggaran 2021 adalah 96% dari target penyaluran dana bergulir sebesar Rp.600 Miliar. Pada Triwulan IV Tahun 2021, target Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP adalah sebesar 96%;
2. Hingga 31 Desember 2021, realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP berupa pencairan pinjaman kepada debitur BLU LPMUKP mencapai Rp.270.553.725.000 dengan total pemanfaat sebanyak 6.888 Orang. Persentase capaian penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP terhadap target tahunan adalah sebesar 45,09% dan capaian terhadap target Triwulan IV mencapai 46,79%;
3. Tidak tercapainya target Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP periode Triwulan IV dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:
 - a. Kondisi pandemi covid-19 khususnya pada periode Triwulan II dan III menghambat kinerja penyaluran dana bergulir LPMUKP, hal tersebut juga berdampak pada kinerja kumulatif penyaluran dana bergulir pada Triwulan IV.
 - b. Pelaksanaan komite pinjaman yang melibatkan Unit Eselon I mengakibatkan kinerja penyaluran pada Triwulan III dan awal Triwulan IV tidak optimal. Hal ini disebabkan karena LPMUKP perlu melakukan perumusan kebijakan terkait mekanisme komite pinjaman yang baru.
 - c. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan akad seperti kendala pada notaris dan ban mitra LPMUKP serta persiapan data dalam pelaksanaan akad dengan debitur.

4. Sebagai upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi, BLU LPMUKP akan melaksanakan rencana aksi dalam pencapaian target kinerja penyaluran pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. LPMUKP akan terus mengupayakan pelaksanaan verifikasi ditengah situasi kondisi pandemi *covid-19* agar penyaluran dana bergulir LPMUKP tetap berjalan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi kelayakan usulan pinjaman dana bergulir merupakan salah satu proses bisnis yang harus ditempuh guna memitigasi risiko dalam menyalurkan pinjaman.
 - b. Akan dilakukan scheduling terkait dengan pembahasan komite bersama Unit Eselon I agar komite yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mendorong pelaksanaan penyaluran dana bergulir.
 - c. LPMUKP akan terus berkoordinasi aktif dengan pihak bank mitra dan notaris di daerah yang terlibat dalam pelaksanaan akad serta memperluas jangkauan pelaksanaan akad tersebut dengan perluasan kerjasama dengan notaris dan bank mitra di daerah.
5. Terlampir kami sampaikan data penyaluran dana bergulir LPMUKP Per 31 Desember 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Syarif Syahril

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KKP

Lampiran

Tabel 1. Data Penyaluran Dana Bergulir Menurut Sektor Usaha Perikanan per Desember 2021

Sub Sektor Usaha	Nilai Pencairan	Pemanfaat	Rata-rata
Perikanan Budidaya	146.537.725.000	2.734	57.783.015
Perikanan Tangkap	64.830.000.000	2.002	33.246.154
Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	50.799.000.000	2.071	25.838.759
Usaha Garam Rakyat	7.662.000.000	37	163.021.277
Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	725.000.000	35	20.714.286
Total	270.553.725.000	6.888	41.407.059

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

M E M O R A N D U M

Nomor : 10/LPMUKP/I/2022

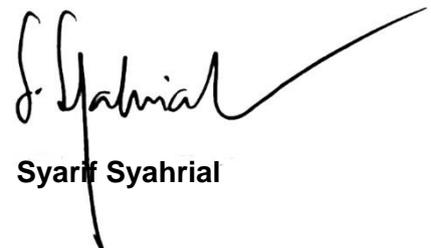
Yth : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Direktur LPMUKP
Hal : Penyampaian Hasil Capaian Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP per 31 Desember 2021
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 10 Januari 2022

Sehubungan telah dilakukannya pengukuran IKU Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP periode Triwulan IV Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Tahun Anggaran 2021 adalah 96% dari target penyaluran dana bergulir sebesar Rp.600 Miliar. Pada Triwulan IV Tahun 2021, target Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP adalah sebesar 96%;
2. Hingga 31 Desember 2021, realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP berupa pencairan pinjaman kepada debitur BLU LPMUKP mencapai Rp.270.553.725.000 dengan total pemanfaat sebanyak 6.888 Orang. Persentase capaian penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP terhadap target tahunan adalah sebesar 45,09% dan capaian terhadap target Triwulan IV mencapai 46,79%;
3. Tidak tercapainya target Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP periode Triwulan IV dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:
 - a. Kondisi pandemi covid-19 khususnya pada periode Triwulan II dan III menghambat kinerja penyaluran dana bergulir LPMUKP, hal tersebut juga berdampak pada kinerja kumulatif penyaluran dana bergulir pada Triwulan IV.
 - b. Pelaksanaan komite pinjaman yang melibatkan Unit Eselon I mengakibatkan kinerja penyaluran pada Triwulan III dan awal Triwulan IV tidak optimal. Hal ini disebabkan karena LPMUKP perlu melakukan perumusan kebijakan terkait mekanisme komite pinjaman yang baru.
 - c. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan akad seperti kendala pada notaris dan ban mitra LPMUKP serta persiapan data dalam pelaksanaan akad dengan debitur.

4. Sebagai upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi, BLU LPMUKP akan melaksanakan rencana aksi dalam pencapaian target kinerja penyaluran pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. LPMUKP akan terus mengupayakan pelaksanaan verifikasi ditengah situasi kondisi pandemi *covid-19* agar penyaluran dana bergulir LPMUKP tetap berjalan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi kelayakan usulan pinjaman dana bergulir merupakan salah satu proses bisnis yang harus ditempuh guna memitigasi risiko dalam menyalurkan pinjaman.
 - b. Akan dilakukan scheduling terkait dengan pembahasan komite bersama Unit Eselon I agar komite yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mendorong pelaksanaan penyaluran dana bergulir.
 - c. LPMUKP akan terus berkoordinasi aktif dengan pihak bank mitra dan notaris di daerah yang terlibat dalam pelaksanaan akad serta memperluas jangkauan pelaksanaan akad tersebut dengan perluasan kerjasama dengan notaris dan bank mitra di daerah.
5. Terlampir kami sampaikan data penyaluran dana bergulir LPMUKP Per 31 Desember 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Syarif Syahril

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KKP

Lampiran

Tabel 1. Data Penyaluran Dana Bergulir Menurut Sektor Usaha Perikanan per Desember 2021

Sub Sektor Usaha	Nilai Pencairan	Pemanfaat	Rata-rata
Perikanan Budidaya	146.537.725.000	2.734	57.783.015
Perikanan Tangkap	64.830.000.000	2.002	33.246.154
Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	50.799.000.000	2.071	25.838.759
Usaha Garam Rakyat	7.662.000.000	37	163.021.277
Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	725.000.000	35	20.714.286
Total	270.553.725.000	6.888	41.407.059

Perhitungan Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2021

Rasio dana bergulir diragukan adalah perbandingan antara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan *outstanding* Piutang Dana Bergulir.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 131/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Kodefikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012, dirumuskan acuan sebagai berikut:

- 1) Perhitungan rasio *Non Performing* (NPF) adalah Pembiayaan (Kurang Lancar, Diragukan, Macet)/ Total Pembiayaan.
- 2) Pembiayaan (Kurang Lancar, Diragukan, Macet) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- 3) Peringkat Komposisi Bank yang dikategorikan secara umum sangat sehat dan secara umum sehat, adalah yang antara lain memnuhi rasio NPF kurang dari 5%.

Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan data kolektibilitas debitur LPMUKP adalah sebesar Rp.17.842.460.950 dari *outstanding* pinjaman sebesar Rp.621.083.506.865 dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas	Dana Bergulir Diragukan Tertagih ^(*)
Kurang Lancar	7.223.646.167
Diragukan	3.400.255.129
Macet	7.522.159.925
Jumlah	18.146.061.221

*Jumlah Dana Bergulir Tertagih tersebut berdasarkan data Laporan Keuangan Unadited per tanggal 31 Desember 2021

Perhitungan Rasio Dana Bergulir Tertagih berdasarkan Manual IKU adalah sebagai berikut:

$$\text{RDBDT} = \frac{\text{Jumlah Dana Bergulir Kurang Lancar, Diragukan dan Macet}}{\text{Jumlah outstanding Piutang Dana Bergulir}} \times 100\%$$

$$\text{RDBDT} = \frac{18.146.061.221}{621.083.506.865} \times 100\%$$

$$\text{RDBDT} = \mathbf{2,92\%}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih BLU LPMUKP adalah sebesar **2,92%** dan capaian tersebut masih sesuai dengan target IKU Rasio Dana

Bergulir Diragukan Tertagih yaitu maksimal sebesar **5%**. Pencapaian IKU Rasio Dana Bergulir Diragukan tertagih dipengaruhi oleh laju pengembalian pinjaman oleh para debitur kepada BLU LPMUKP sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Seiring berjalannya program penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP kepada masyarakat di sektor Kelautan dan Perikanan, semakin banyak dana bergulir yang dicairkan maka potensi jumlah dana bergulir yang diragukan pun juga akan meningkat, maka dari itu perlu adanya suatu mitigasi risiko dalam hal pengembalian dana bergulir.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini sebagian besar merupakan pengaruh dari gagal produksi akibat dari kondisi pandemi *covid-19* dan bencana alam yang menyebabkan para debitur mengalami permasalahan dalam memperoleh pendapatan dan menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada LPMUKP.

Sebagai upaya dalam menekan angka rasio dana bergulir diragukan tertagih, LPMUKP akan terus berupaya dalam menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir yang dimulai dari pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kualitas proposal, verifikasi kelayakan usulan pinjaman dana bergulir secara *on the spot* serta pelaksanaan penanganan pinjaman bermasalah dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut akan menekan rasio dana bergulir diragukan tertagih.

Mengetahui,

Kepala Sub Divisi Pengelolaan Risiko



Doni Arifin Lubis



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	660056 LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	53,198,951,000 48,666,256,266 (91.48%)	1,141,550,000 1,062,907,500 (93.11%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	54,340,501,000 49,729,163,766 (91.51%)
		SISA	0	4,532,694,734	78,642,500	0	0	0	0	0	0	4,611,337,234
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	53,198,951,000 48,666,256,266 (91.48%)	1,141,550,000 1,062,907,500 (93.11%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	54,340,501,000 49,729,163,766 (91.51%)
		SISA	0	4,532,694,734	78,642,500	0	0	0	0	0	0	4,611,337,234

Realisasi Capaian Persentase Modernisasi BLU LPMUKP

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Nilai	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Pengelolaan Badan Layanan Umum yang Berkesinambungan	Persentase Peyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	100%	97%	97%
a	Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	Nilai (%)	82%	82%
		Operasionalisasi Aplikasi BIOS	15%	15%	15%
		Ketersediaan Website yang representatif	10%	9%	9%
		Ketersediaan database yang terpusat	10%	7%	7%
		Ketersediaan dashboard intern dan ekstern	10%	10%	10%
		Ketersediaan webservice untuk transfer data ke Kementerian Keuangan	50%	11%	11%
		Ketersediaan SOP terkait dengan sistem yang memanfaatkan Teknologi Informasi	10%	9%	9%
		Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik	10%	10%	10%
		Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan	10%	10%	10%
Variabel Tambahan					
		Periode Penerapan	Nilai (%)	15%	15%
		Kelengkapan Pengisian Data BIOS	15%	15%	15%
		Ketepatan waktu penyampaian laporan/data melalui BIOS (sesuai dengan peraturan dan/atau surat permintaan dari Direktorat PPKBLU)	10%	0%	0%

1. Operasionalisasi Aplikasi BIOS

LPMUKP secara berkala telah menyampaikan data dan informasi terkait proses dan dokumentasi melalui aplikasi BIOS yang terbagi ke dalam tiga segmen modul:

a. Modul Data Layanan

No	Tahun	Uraian	bulan	jumlah	Status	Keterangan	Action
1	2021	Jumlah Realisasi penyaluran dana kelolaan (Rp.)	04	13.012.000.000,00	DIAJUKAN		Hapus
2	2021	Jumlah Realisasi PNBP BLU Berupa Pendapatan dari Jasa Layanan (Rp)	06	1.706.950.172,00	DIAJUKAN		Hapus
3	2021	Jumlah Realisasi penerima dana bergulir untuk end user (Org /Kel)	03	357,00	DIAJUKAN		Hapus
4	2021	Jumlah Provinsi yang terdapat penyaluran (Prov)	04	16,00	DIAJUKAN		Hapus
5	2021	Jumlah Provinsi yang terdapat penyaluran (Prov)	03	22,00	DIAJUKAN		Hapus

b. Modul RSA/ RBA

No	Kode	Nama Satker	Jenis Rencana	Tahun	Surat RBA	Tanggal RBA	Status	Action
1	032.01.660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rencana Strategis Bisnis	2021	2201/LPMUKP/VI/2021	2021/06/30	Dijjukan Oleh Satker	RBA, Update, Hapus
2	032.01.660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rencana Bisnis Anggaran	2021	1278/LPMUKP/IV/2021	2021/04/19	Dijjukan Oleh Satker	RBA, Update, Hapus
3	032.01.660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rencana Bisnis Anggaran	2023	4990/LPMUKP/XII/2021	2021/12/31	Dijjukan Oleh Satker	RBA, Update, Hapus
4	032.01.660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rencana Bisnis Anggaran	2020	249.3/SJ/XII/2019	2019/12/27	Dijjukan Oleh Satker	RBA, Update, Hapus
5	032.01.660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rencana Bisnis Anggaran	2023	4990/LPMUKP/XII/2021	2021/12/31	Dijjukan Oleh Satker	RBA, Update, Hapus
6	032.01.660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rencana Bisnis Anggaran	2019	192/LPMUKP/I/2019	2019/01/23	Approval Satker	RBA

c. Modul Dokumentasi

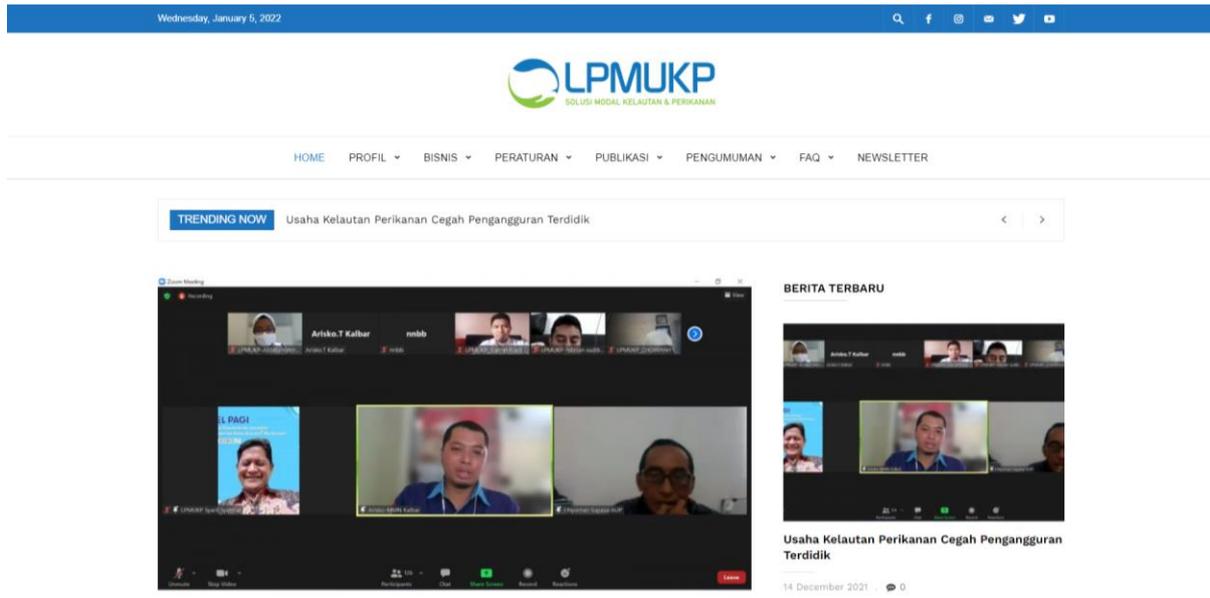
No	Kode	Nama Satker	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Status	Action
1	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Charter Dewas	-	28-09-2021	Upload Satker	Download, Update, Hapus
2	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	KMK Penetapan BLU	KMK 710/KMK.05/2016	20-09-2016	Diterima PPK BLU	Download
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PMK Tarif	PMK 100/PMK.05/2017	18-07-2017	Diterima PPK BLU	Download
4	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	KMK Remunerasi	KMK 878/KMK.05/2017	23-11-2017	Diterima PPK BLU	Download
5	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pedoman Pembayaran Remunerasi	KEPDIR NOMOR 66/KEP-LPMUKP/2018	28-05-2018	Diterima PPK BLU	Download
6	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kontrak Kinerja Pimpinan BLU dan Dirjen Perbendaharaan	PRJ-220/PB/2019	22-07-2019	Diterima PPK BLU	Download
7	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Standar Pelayanan Minimum	47/PERMEN-KP/2014	13-10-2014	Diterima PPK BLU	Download
8	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Daftar Rekening BLU	-	18-11-2019	Diterima PPK BLU	Download
9	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Daftar Rekening BLU	S-1833/WPB.12/KP.02/2020	16-09-2020	Diterima PPK BLU	Download

2. Ketersediaan Website yang representatif

LPMUKP telah secara berkala melakukan rilis konten terkait kegiatan maupun agenda yang telah dilaksanakan, baik yang sifatnya berupa berita informatif maupun liputan tentang profil maupun proses penyaluran kepada debitur. Selain itu, desain website telah dibuat responsif agar dapat diakses oleh pengunjung melalui semua device (desktop dan mobile). Website dapat diakses melalui [BLU LPMUKP | Lembaga Pengelola Modal Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan](#)

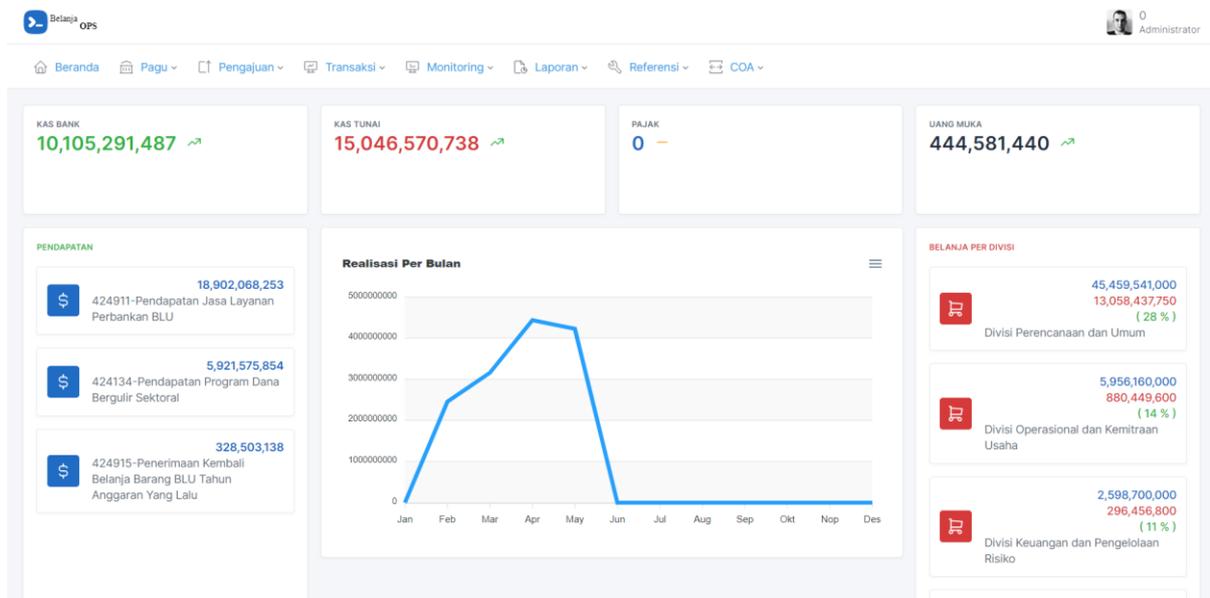
Selain itu, dalam hal meningkatkan *awareness* kegiatan kelautan dan perikanan di mata masyarakat umum, LPMUKP juga secara rutin melakukan publikasi melalui kanal akun sosial

media lainnya ([Instagram](#) , [Twitter](#), [Facebook](#), [YouTube](#)) dengan cakupan konten yang beragam



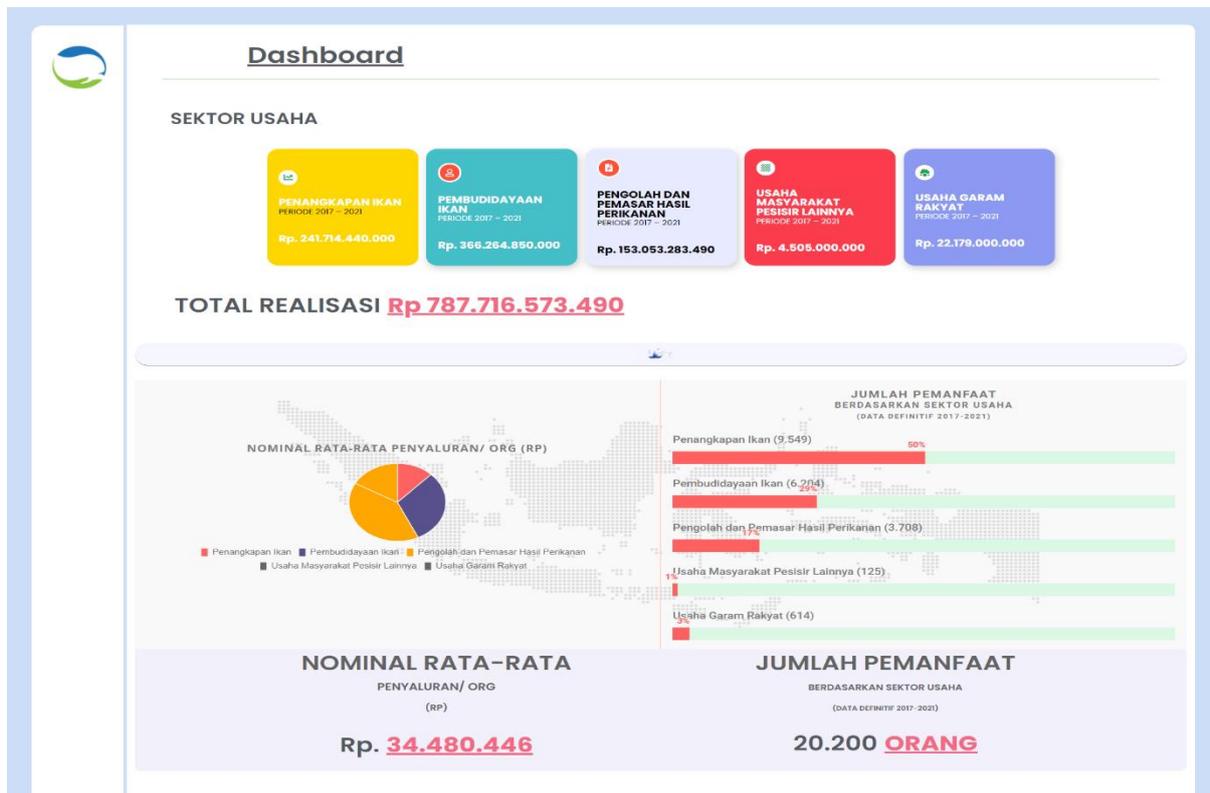
3. Ketersediaan database yang terpusat

Dalam upaya peningkatan layanan sistem keuangan dan mengurangi duplikasi data dalam pencatatan keuangan di organisasi, LPMUKP telah berupaya mereformasi secara bertahap sistem pencatatan keuangan internal yang saat ini salah satunya telah diterapkan di dalam aplikasi Belanja Operasional yang berbasis web.



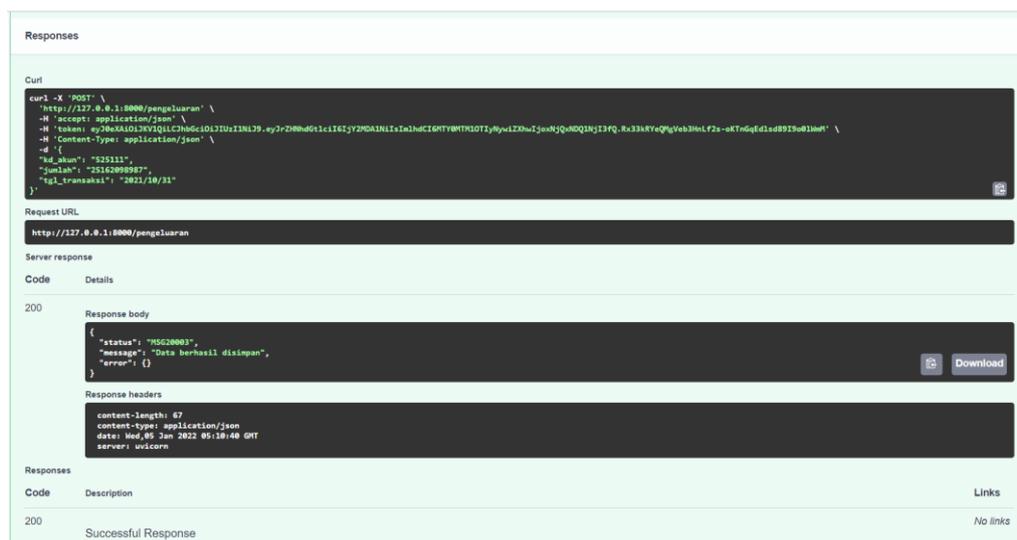
4. Ketersediaan Dashboard Intern dan Ekstern

Informasi mengenai penyerapan pemanfaat serta nominal pencairan atas dana bergulir yang telah terlaksana dapat diakses oleh publik melalui [Data Penyaluran – Laporan Perkembangan Kegiatan Penyaluran Dana Bergulir](#)



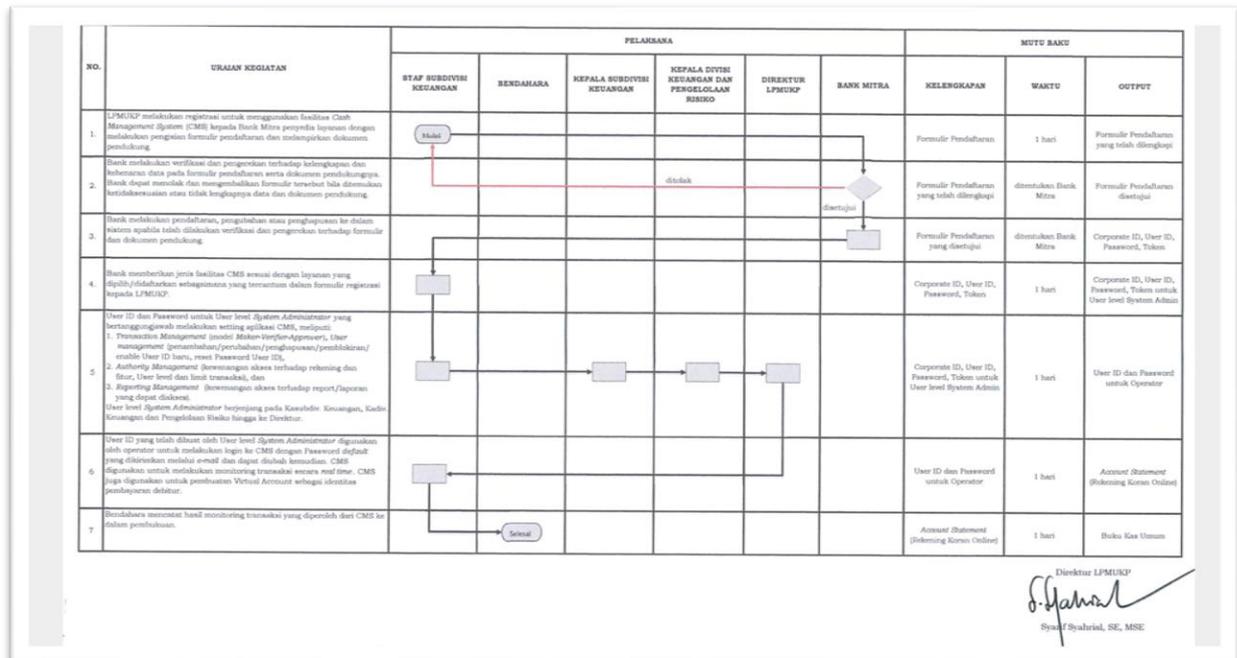
5. Ketersediaan webservice untuk transfer data ke Kementerian Keuangan

LPMUKP telah mengembangkan webservice untuk melakukan transfer data (saldo, penerimaan, pengeluaran) ke Kementerian Keuangan menggunakan sistem API (metode POST) yang telah disesuaikan berdasarkan pedoman dari PPK BLU. Pengirimandata dilakukan secara periodik (per bulan)



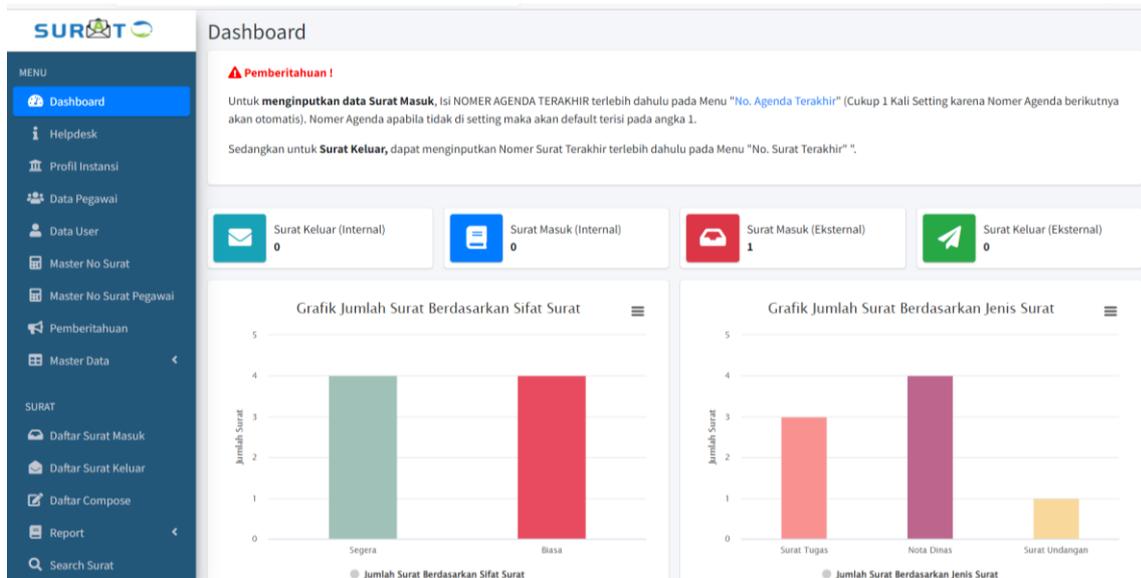
6. Ketersediaan SOP terkait dengan sistem yang memanfaatkan Teknologi Informasi

Dalam upaya peningkatan efektivitas kinerja serta pendayagunaan sistem yang telah ada, maka LPMUKP telah melakukan penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) sebagai tolak ukur pemanfaatan teknologi informasi yang ada di lingkup internal organisasi.



7. Ketersediaan dan implementasi Sistem Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik

Tata naskah dinas secara elektronik menggunakan aplikasi berbasis web untuk keperluan persuratan yang dikenal dengan istilah *Office Automation*.



8. Implementasi inovasi di bidang teknologi informasi untuk peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan

Dalam hal peningkatan layanan yang akuntabel terhadap masyarakat kelautan dan perikanan, LPMUKP secara terbuka telah mempersiapkan wadah pengaduan yang dapat diakses melalui www.lapor.go.id

LAPOR! TENTANG LAPOR! STATISTIK MASUK DAFTAR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
 Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Sampaikan Laporan Anda

Pilih Klasifikasi Laporan: PENGADUAN ASPIRASI PERMINTAAN INFORMASI

Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar

Judul Laporan Anda *
 Kode Isi Laporan Anda *
 Waktu tanggal kejadian *
 Kode Lokasi kejadian *
 Kode Instansi Tujuan
 Pilih Kategori Laporan Anda

Dipost Lamirkan
 Anonim
 Rahasia

Selain itu, dalam hal peningkatan akurasi data terkait pencatatan transaksi tiap-tiap debitur, LPMUKP melakukan inovasi melalui sistem aplikasi Kartu Piutang berbasis web.

10:06 Sat 11 Dec Not Secure — e-debitur.blupmukp.id

eDEBitur TA. 2021 admin

admin Administrator

MAIN NAVIGATION

- Beranda
- Rekening
 - Transaksi
 - Saldo
 - Rekonsiliasi
- Debitur
- Laporan
- Referensi
- Piutang
- Utilitas

Tanggal: 2021-11-01 2021-11-30

Uraian: Filter

Transaksi

Tanggal	Uraian	Jenis rekening	Kelompc	Debet	Kredit
01-Nov-202	Jasa Layanan Niti Untoro	Pendapatan Ja BRI 023001003	DL00153	250,000	0
01-Nov-202	Jasa Layanan Soetarsa	Pendapatan Ja BRI 023001003	DL00141	250,000	0
01-Nov-202	Jasa Layanan Supriyono	Pendapatan Ja BRI 023001003	DL00074	1,250,000	0
01-Nov-202	Jasa Layanan Kop Wisata Mina Bahari 45	Pendapatan Ja BRI 023001003	DL00000	6,250,000	0
01-Nov-202	Pindah Buku ke Rek Ops Pengeluaran	Pindah Buku ke BRI 023001003	#N/A	0	1,859,351,575
01-Nov-202	Jasa Layanan Poklahsar Ngaglik Murni Jaya 2	Pendapatan Ja BRI 023001003	DL00094	712,500	0
01-Nov-202	Jasa Layanan Abdul Kadir	Pendapatan Ja BRI 023001003	DL00178	337,500	0
01-Nov-202	Jasa Layanan Maryamah	Pendapatan Ja BRI 023001003	DL00151	25,000	0
01-Nov-202	Jasa Layanan Poklahsar Makmur Jaya	Pendapatan Ja BRI 023001003	DL00094	375,000	0
01-Nov-202	Jasa Layanan Kelompok Nelayan Juru Layuru	Pendapatan Ja BRI 023001003	DL00056	628,250	0

Page 1 of 274 Displaying 1 to 10 of 2736 items

Kemudian untuk meningkatkan laju penyaluran, LPMUKP membuat produk penyaluran yang terfokus pada jenis pinjaman di bawah 50 juta berbasis web.

LOAN ORIGINATION SYSTEM Wahyu G

Inquiry

App No	Nama Nasabah	Cabang	Tanggal Dibuat	Total Umur	Umur	Role	Stage	Status	User
202112282100001	RAHMAN YATIM	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	12/29/2021	6	7	Putusan Komite	Approved / Disetujui	APPROVED	Yulhendi S-Yulhendi S
202112292100005	M. Kailani	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	12/29/2021	6	6	Putusan Komite	Approved / Disetujui	APPROVED	Yulhendi S-Yulhendi S
202112292100006	M Saidin	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	12/29/2021	6	6	Putusan Komite	Approved / Disetujui	APPROVED	Yulhendi S-Yulhendi S
202112292100007	Muhammad Fadli	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	12/29/2021	6	6	Putusan Komite	Approved / Disetujui	APPROVED	Yulhendi S-Yulhendi S
202112292100008	M. Sapuan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	12/29/2021	6	6	Putusan Komite	Approved / Disetujui	APPROVED	Rikhi Ibrahim-Rikhi Ibrahim
202112292100009	Supriadi	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	12/29/2021	6	6	Putusan Komite	Approved / Disetujui	APPROVED	Rikhi Ibrahim-Rikhi Ibrahim
202112292100010	Sali	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	12/29/2021	6	6	Putusan Komite	Approved / Disetujui	APPROVED	Rikhi Ibrahim-Rikhi Ibrahim

Penanggung Jawab IKU

Kepala Divisi Perencanaan dan Umum



Endraji Tunjung Seto

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA
TAHUN 2021**

NAMA UNIT KERJA	Sekretariat Jenderal
NAMA UNIT YBS	LPMUKP
USER KINERJAKU	0110000000
TANGGAL REKON	23 November 2021

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ			Data Dukung LKJ Tw III*
					Tw I	Tw II	Tw III	
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan								

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerjaaku	PK - LKJ Tw III	PK - Kinerjaaku	LKJ Tw III - Kinerjaaku	LKJ Tw III - Kinerjaaku
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skor	100,00							
Catatan	-	-	-	-	-	-	-	-

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2021		
	Tw I	Tw II	Tw III
	111,34	90,90	81,87
Skor	94,70		
Catatan	-	-	-

ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
	100,00	100,00
Skor	100,00	
Catatan		

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	94,70	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	23,68	20,00
Total Skor	93,68			

SKALA	
>90 - 100	SANGAT BAIK
>85 - 90	BAIK
>75 - 85	CUKUP
>50 - 75	KURANG
0 - 50	BURUK

CATATAN:

A. ASPEK KEPATUHAN:
Dokumen SAKIP telah sesuai dengan Permen KP 68/2017

B. ASPEK KESESUAIAN:
Pada LKJ untuk dilengkapi perbandingan capaian terhadap target tahunan, ditambahkan penjelasan tindak lanjut rencana aksi dari triwulan sebelumnya, ditambahkan penjelasan keberhasilan dan belum tercapainya target indikator kinerja.

D. ASPEK KETEPATAN:
Memo penyampaian LKJ Tahun 2020 telah disampaikan kepada atasan pada tanggal 20 Januari 2021 telah sesuai dengan target yang diatur pada Permen KP 68/2017 dan telah diupload dalam aplikasi Esakip Revui pada tanggal 11 Februari 2021 dan telah sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan No. 271.SJ.1/TU.210/III/ 2021 tanggal 3 Februari 2021 dengan target upload maksimal pada tanggal 17 Februari 2021.

Pembahas I



Helena Yusfik

Pembahas II



Sigit Rachmad Admojiarso

Unit yang di Sampling
LPMUKP

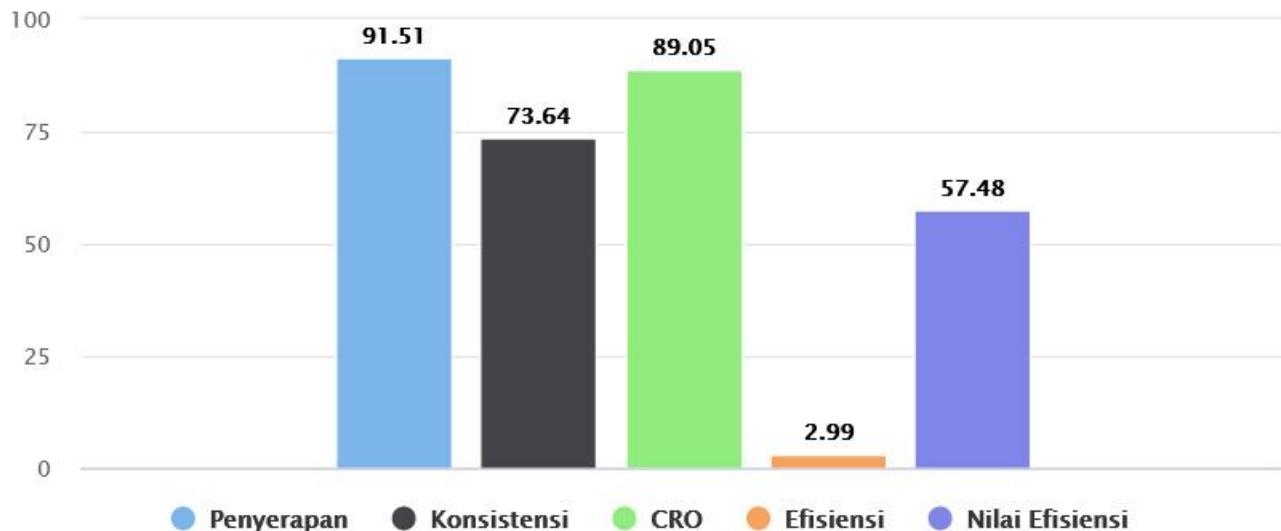


Iko Prasetyo

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Nilai SMART
77.45
Cukup



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor : 75/SJ.7/TU.210/I/2022

Yth : 1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Humas Kerjasama Luar Negeri;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;
5. Kepala Biro Hukum;
6. Kepala Biro Umum dan PBJ;
7. Direktur LPMUKP.

Dari : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Hal : **Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Triwulan IV 2021.**

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Tanggal : 6 Januari 2022.

Menindaklanjuti pengukuran capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Sekretariat Jenderal adalah sebesar **93.34%**;
2. Target capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV yang harus dipenuhi oleh masing-masing Eselon II adalah sebesar **84,00%**;
3. Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV 2021 secara keseluruhan eselon II telah melampaui target yang sudah ditentukan;
4. Adapun Rincian penilaian hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Eselon II	Nilai Capaian	Nilai Target
1.	LPMUKP	97.45	84.00
2.	Pusat Data, Statistik dan Informasi	96.44	84.00
3.	Biro Hukum	95.33	84.00
4.	Biro Perencanaan	95.14	84.00
5.	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	93.98	84.00
6.	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	93.31	84.00

No.	Nama Eselon II	Nilai Capaian	Nilai Target
7.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	86.61	84.00
8.	Biro Keuangan	84.93	84.00
Sekretariat Jenderal		93.34	84.00

5. Nilai capaian tertinggi Triwulan IV diperoleh oleh LPMUKP yaitu sebesar **97.45%**, sedangkan nilai capaian terendah diperoleh Biro Keuangan yaitu sebesar **84.93%**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik

Yudi Priatno

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
Nomor 3444/SJ.2/TU.140/X/2021

Yth. : 1. Kepala Biro Umum dan PBJ
2. Plt. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
3. Kepala Biro Perencanaan
4. Kepala Biro Humas dan KLN
5. Biro Hukum
6. Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
7. Direktur LPMUKP

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Penyampaian Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Setjen, Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPKRI atas LK Setjen, dan Level Maturitas SPIP Setjen Tahun 2020

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tanggal : 04 Oktober 2021

Sehubungan dengan telah memasuki triwulan 3 tahap pelaporan capaian kinerja lingkup Setjen, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan capaian IKU Tahunan Setjen yang menjadi tanggungjawab Biro Keuangan, yaitu :

1. Persentase Penyelesaian Temuan BPK RI lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK RI atas LK Sekretariat Jenderal; dan,
3. Level Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomai, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih



Ditandatangani
Secara Elektronik

Cipto Hadi Prayitno

Tembusan :
Sekretaris Jenderal

Lampiran :

Nomor : 3444/SJ.2/TU.140/X/2021

Tanggal : 04 Oktober 2021

a. Persentase Penyelesaian Temuan BPK RI lingkup Sekretariat Jenderal

No	Satker	Nilai Temuan Kepatuhan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Nilai Temuan (Rp)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100,00
2	Biro SDMAO	-	-	-	100,00
3	Biro Hukum	-	-	-	100,00
4	Biro Humas dan KLN	-	-	-	100,00
5	Biro Keuangan	-	-	-	100,00
6	Biro Umum dan PBJ	51.996.250,00	51.996.250,00	0,00	100,00
7	Pusdatin	-	-	-	100,00
8	LPMUKP	176.347.700,00	176.347.700,00	0,00	100,00
	Total	228.343.950,00	228.343.950,00	0,00	100,00

b. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK RI atas LK Sekretariat Jenderal

PAGU DAN REALISASI SERTA NILAI TEMUAN LHP LK TAHUN 2020
SATKER LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL

No	Nama Satker	Pagu	Realisasi		Nilai Temuan	
			Rp	%	Rp	%
1	Biro SDMAO	6.613.657.000	6.315.643.177	95,49	-	0
2	Biro Humas dan KLN	16.447.994.000	16.234.763.168	98,70	-	0
3	Biro Perencanaan	12.769.043.000	12.681.384.252	99,31	-	0
4	Biro Keuangan	6.287.462.000	6.122.649.731	97,38	-	0
5	Biro Hukum	5.476.209.000	5.326.993.303	97,28	-	0
6	Biro Umum dan PBJ	257.359.684.000	244.376.427.441	94,96	202.834.825	0,08
7	Pusdatin	24.021.942.000	23.558.951.189	98,07	-	0
8	LPMUKP	58.234.286.000	44.108.010.076	75,74	176.347.700	0,40
9	Dekonsentrasi	13.489.997.000	13.049.422.461	96,73	-	0
	TOTAL	400.700.274.000	371.774.244.798	92,78	379.182.525	0,10

c. Level Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Tahun 2020

No	Unit Eselon I	Jumlah Skor	Tingkat Maturitas		Ket
			Kategori	Nilai	
1	Setjen	3,664	3	Terdefinisi	
2	Itjen	3,664	3	Terdefinisi	
3	Ditjen PT	3,471	3	Terdefinisi	
4	Ditjen PB	3,305	3	Terdefinisi	
5	Ditjen PSDKP	3,410	3	Terdefinisi	
6	Ditjen PDSPKP	3,441	3	Terdefinisi	
7	Ditjen PRL	3,365	3	Terdefinisi	
8	BRSDMKP	3,320	3	Terdefinisi	
9	BKIPMKHP	3,433	3	Terdefinisi	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor: 59/SJ.2/RC.610/I/2022

Yth : 1. Para Kepala Biro
2. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
3. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha KP

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2021

Tanggal : 12 Januari 2022

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Sekretariat Jenderal periode Triwulan IV Tahun 2021 bersama ini disampaikan Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” periode Triwulan IV Tahun 2021 diperoleh sebesar **100,00%** yaitu dari 118 Rekomendasi telah ditindaklanjuti sampai tuntas secara keseluruhan). Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan pada prognosis Laporan Kinerja Triwulan IV yaitu sebesar 93,42%.
2. Capaian IKU ini merupakan perolehan tertinggi dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu berkat komitmen dan kerja sama para penanggung jawab kegiatan maupun para pimpinan atas pentingnya penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal untuk perbaikan kinerja Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal.
3. Perolehan ini berdasarkan pada jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV 2020 s.d. Triwulan III 2021 (1 Oktober 2020 s.d. 30 September 2021) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 (31 Desember 2021).

4. Namun perlu menjadi perhatian atas LHP yang terbit selain dalam periode sebagaimana dimaksud pada angka tiga yang belum terselesaikan. LHP ini membutuhkan penanganan khusus karena ada yang merupakan temuan lama dimana terdapat rekomendasi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga sulit untuk ditindaklanjuti dan perlu didiskusikan di level pimpinan dan yang lainnya merupakan temuan baru yang membutuhkan tindak lanjut dari seluruh Unit Eselon II lingkup Setjen dengan daftar rincian LHP sebagaimana terlampir.
5. Adapun capaian IKU dari masing-masing Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2021 disajikan pada Lampiran.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Cipto Hadi Prayitno

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Memorandum
 Nomor : 59/SJ.2/RC.610/I/2022
 Tanggal : 12 Januari 2022

**Data Rekapitulasi Capaian IKU
 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
 Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2021**

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendas (%)
1	Biro Perencanaan	23	23	100,00	0	00,00
2	Biro Keuangan	10	10	100,00	0	00,00
3	Biro Umum dan PBJ	10	10	100,00	0	00,00
4	Biro Hukum	19	19	100,00	0	00,00
5	Biro SDMAO	20	20	100,00	0	00,00
6	Biro Humas dan KLN	0	0	100,00	0	00,00
7	Pusdatin	25	25	100,00	0	00,00
8	LPMUKP	11	11	100,00	0	00,00
TOTAL		118	118	100,00	0	00,00

**Jumlah Rekomendasi pada Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal
 Lingkup Sekretariat Jenderal yang belum terselesaikan**

No	Unit Kerja	LHP	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Sisa Rekomendasi
1	Biro Perencanaan	LHE PUG TA. 2021	2	0	2
2	Biro Keuangan	SHE Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN TA. 2021	2	0	2
3	Biro Umum dan PBJ	LHR RK-BMN Tahun 2023	4	3	1
4	Biro Hukum		0	0	0
5	Biro SDMAO		0	0	0
6	Biro Humas dan KLN	LHE atas Manajemen Aset PUSKITA TA. 2014	11	8	3
7	Pusdatin		0	0	0
8	LPMUKP	SHE Kinerja TA 2021	10	7	3
TOTAL			34	19	15